

**KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH TERHADAP HARTA WARIS
(STUDI PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN
MUHAMMADIYAH DI PROVINSI LAMPUNG)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

MUCHAMAD RIMA SAPUTRA
NPM. 1421010084

Jurusan : Al-Ahkwal Al-Syakhsiyyah

Dosen Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H
Dosen Pembimbing II : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG

1438 H / 2017 M

**KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH TERHADAP HARTA WARIS
(STUDI PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN
MUHAMMADIYAH DI PROVINSI LAMPUNG)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

Muchamad Rima Saputra

NPM : 1421010084

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H.

Pembimbing II : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

2018

ABSTRAK

Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Harta Waris (Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Provinsi Lampung)

Oleh:

Muchamad Rima Saputra

Berdasarkan hukum Islam atau hukum perkawinan di Indonesia, bahwa hanya perkawinan yang sah seorang anak dapat dinasabkan pada ayahnya. Adapun jika perkawinan tersebut tidak sah, maka seorang anak tidak dapat di nasabkan kepada ayahnya termasuk hak-hak keperdataannya pun ikut gugur. Menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah juga berpendapat bahwa anak yang di luar nikah menurut segi hukum Islam nasabnya terputus dari ayah biologisnya dan hanya bernasabkan kepada ibu kandungnya dan keluarga ibu kandungnya saja.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak luar nikah terhadap harta waris menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan anak luar nikah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak luar nikah terhadap harta waris menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data yang di gunakan berupa buku-buku, Jurnal, dan wawancara serta dokumen-dokumen dan lain-lain. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan kedudukan anak luar nikah terhadap harta waris menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Provinsi Lampung adalah pada hakikat dan syariat hukum Islam anak yang lahir di luar nikah tidak mendapatkan harta waris karena nasabnya terputus kepada ayah biologisnya sedangkan kepada ibunya anak tersebut masih ada ikatan nasabnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 100. Namun ada sebuah solusi atau jalan keluar untuk memberikan hak waris kepada anak luar nikah tersebut, menurut tokoh Nahdlatul Ulama dan muhammadiyah yaitu berupa hibah yang diberikan sebelum si pewaris meninggal dunia dan wasiat wajibah yang diberikan sesudah si pewaris meninggal dunia melalui ketentuan Pengadilan Agama dan tidak boleh melebihi 1/3 dari ayah biologisnya.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. H.EndroSuratmin, Sukarama Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama : **Muchamad Rima Saputra**

NPM : **1421010084**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Al-Ahwal Al-Syaksiyyah (Hukum Keluarga)**

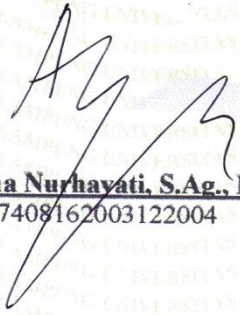
Judul Skripsi : **Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Harta Waris (Studi
Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di
Provinsi Lampung)**

DISETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas

Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

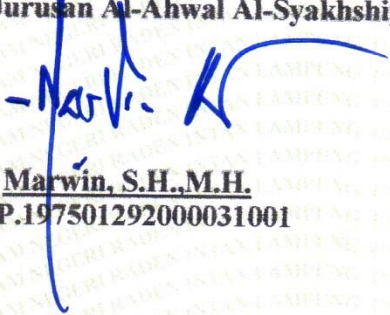

Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H
NIP. 197408162003122004

Pembimbing II


Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.
NIP. 198206242009011015

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah


Marwin, S.H., M.H.
NIP.197501292000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH TERHADAP HARTA WARIS (STUDI PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DI PROVINSI LAMPUNG)**, Disusun oleh **Muchamad Rima Saputra**, NPM: 1421010084, Fakultas: Syari'ah, Jurusan: **Al-Ahwal Al-Syakhsyah** Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: Jum'at, 27 Juli 2018

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Marwin, S.H., M.H.
Sekretaris : Ahmad Sukandi, M.H.I.
Penguji I : Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Alamsyah, M.Ag
NIP. 19700911997031002

MOTTO

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيْمَانَ رَجُلٍ
عَنْ

عَا هَرَبِحْرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَا لَوْلَدُ وَلَدُ زِنَا ، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ (رواه الترمذی)

Artinya: “Lelaki manapun yang berbuat zina dengan seorang wanita merdeka
atau budak, maka anak yang lahir adalah anak zina, tidak bisa
mewarisi atau diwarisi.” (HR. Turmudzi)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

¹HR. At-Tirmidzi, *Kitab a-Faraidh*, 4/428 dan dishahihkan al- Albani dalam shahih sunan at-Titmidzi dan shahih al-Jami, no. 2723

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmaanirrahiim, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan rasa syukur kepada Allah SWT, Kupersembahkan rasa terimakasihku atas semua bantuan dan do'a yang telah diberikan dengan terselesainya skripsi ini kepada:

1. Ibundaku tercinta Ibu Cik Malena dan Ayahandaku tersayang Bapak Muhammad Suropto terimakasih atas semangat, dukungan, kesabaran, do'a dan nasihat serta kasih sayang yang kalian berikan demi keberhasilan putramu, pengorbanan dan do'a kalian hingga aku dapat menyelesaikan pendidikanku, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat serta nikmat-Nya kepada Ayah dan Ibuku tercinta.
2. Adikku yang tersayang Novi Safitri yang telah mendoakan, dan memotivasiku dan selalu mendukung aku dalam menyelesaikan pendidikanku, semoga kamu bisa menjadi kebanggaan keluarga dihari esok.
3. Keluarga besar kontrakanku yang telah membantu dan menemaniku serta memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
4. Semua sahabat satu angkatan, terkhusus teman-teman sepejuanganku yang selalu bersamaku yaitu kelas B yang tidak dapat aku sebutkan satupersatu, yang telah memberikan aku semangat dan dukungan luar biasa serta teman-teman KKN kelompok 131, terimakasih banyak selama ini telah menjadi sahabat dan teman terbaik dalam hidupku.
5. Yang aku banggakan almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Muchamad Rima Saputra dilahirkan di kelurahan Sindang Kecamatan Koja Kabupaten Jakarta Utara pada tanggal 24 Agustus 1996. Anak pertama dari dua bersaudara, buah cinta kasih dari pasangan Muhammad Suropto dan Cik Malena.

Menempuh pendidikan berawal dari TK Riyadlul Jannah pada tahun 2000 selesai pada tahun 2002 lalu melanjutkan ke pendidikan Sekolah Dasar Negeri Pasir Gombang 01 pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan ke pendidikan tingkat pertama di SMPN 01 Cibitung pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2011 kemudian melanjutkan pendidikan ke SMAN 2 Cikarang Utara pada tahun 2011 lalu pindah pada tahun 2012 ke SMAN 01 Bengkuntan dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah Jurusan Al- Ahwal Al-Syakhsiiyyah.

KATA PENGANTAR

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT selalu melimpahkan hidayah dan taufiq-Nya dalam kehidupan ini. Tiada kata yang pantas diucapkan selain kalimat tasyakur kahadirat Allah SWT, yang telah memberikan kelapangan berfikir, membukakan pintu hati, dengan Ridho dan Inayah-Nya dan diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH TERHADAP HARTA WARIS (STUDI PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DI PROVINSI LAMPUNG)**

Shlawat beriringkan salam dimohonkan kepada Allah SWT, semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti kita rasakan hingga saat ini. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (SI) di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha sendiri, banyak sekalimotivasi, bantuan pemikiran, materil dan moril serta partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta staf dan jajarannya.

2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya.
3. Ketua jurusan Al- Ahwal Al- Syakhshiyah Marwin S.H., M.H dan sekretaris jurusan Al- Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H selaku Pembimbing I dan Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan pengetahuan, masukan dan membimbing dengan penuh kesabaran, kesungguhan serta keikhlasan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan, serta staf dan karyawan fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung atas kesediaannya membantu dalam menyelesaikan syarat-syarat administrasi.
6. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan dispensasi dan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku, adikku, keluarga besarku, sahabat-sahabat, kakak tingkatku dan semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih

atas do'a, dukungan dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan rahmat serta keberkahan kepada kita semua.

8. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan AS angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, wabil khusus Nur Sudrajat, Ismail, Muhammad Muhlisin, Muhammad Soleh, Arma Yunita Sena dan Dina Lestari terimakasih atas semangat, motivasi, dan bantuan nya dalam penulisan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat terbaiku Zamzami, Ahmad Bayuki, Yopandra Septuri, Meiva Ursyda, Wiwit Trijayanti, Diah Ayu Lestari, Eva Fitriyana dan Rosa Prasisca Petrisia, Muhammad Abduh, Okta Chandra, Rahmad Reno, Panca Ayu Mutiara, Alinka Mayang Putri. Terimakasih atas semangat motivasi dan dukungan yang selalu kalian berikan.
10. Kawan-Kawan KKN angkatan 2014 kelompok 131. Terimakasih atas semangat motivasi dan suport yang selalu kalian berikan.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Amin Yarobbal a lamin.

Bandar Lampung,2018

Penulis

Muchamad Rima Saputra

NPM. 1421010084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	4
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian	12
BAB II KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH TERHADAP HARTA WARIS	
A. Pengertian dan Kedudukan Anak Luar Nikah.....	17
B. Kewarisan Anak Luar Nikah	29
BAB III PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TENTANG KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH DAN PEMBAGIAN HARTA WARISNYA	
A. Gambaran Umum Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah	55

1. Profil dan Sejarah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung	55
a. Profil Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung	55
b. Sejarah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung	61
c. Visi Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung	77
d. Misi Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung	78
e. Struktur Organisasi Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung	78
2. Profil dan Sejarah Muhammadiyah Provinsi Lampung	82
a. Profil Muhammadiyah Provinsi Lampung	82
b. Sejarah Muhammadiyah Provinsi Lampung	86
c. Visi Muhammadiyah Provinsi Lampung	88
d. Misi Muhammadiyah Provinsi Lampung	89
e. Struktur Organisasi Muhammadiyah Provinsi Lampung	89
B. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah dan Pembagian Harta Warisnya	90
C. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah dan Pembagian Harta Warisnya	94

BAB IV ANALISIS

A. Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Provinsi Lampung	100
B. Pembagian Harta Waris Anak Luar Nikah Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Provinsi Lampung	102

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN	105
B. SARAN	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan dari istilah-istilah judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “**KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH TERHADAP HARTA WARIS (STUDI PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DI PROVINSI LAMPUNG)**”.

Kedudukan adalah status, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan kewajibannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu tempat tertentu. Kedudukan dapat juga diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat seseorang tersebut tinggal.²

²Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 22.

Anak adalah penghias dan pelengkap kehidupan rumah tangga, karena anak itu nikmat yang diberikan Allah Swt kepada sepasang kekasih yang merajut cinta kasihnya dalam bahtera rumah tangga.³

Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian diluar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.⁴

Harta waris merupakan harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.⁵ Harta warisan atau harta peninggalan itu dapat berupa harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud. Harta warisan yang berwujud benda misalnya berupa sebidang tanah, bangunan rumah, alat pelengkapan pakaian (adat), barang perhiasan (wanita), perabot rumah tangga, alat-alat transport (sepeda, gerobak, kendaraan bermotor), alat-alat pertanian, senjata baik yang berasal dari harta pusaka, harta bersama (pencarian) orang tua suami isteri, harta bawaan, ternak dan sebagainya. Harta warisan yang tidak berwujud benda misalnya berupa

³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 12.

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2008), h. 80.

⁵ Firdaweri, *Fiqh Mawaris*, Cet. 2, (Bandar Lampung: Fadil Hamdani, 2016), h. 212.

kedudukan atau jabatan adat, gelar adat, hutang-hutang, ilmu ghaib, pesan, amanat, atau perjanjian.⁶

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi masyarakat yang menganut paham Ahlussunah Wal Jama'ah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrim naqli (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi Nahdlatul Ulama tidak hanya Al-Qur'an, Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu, seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fikih mengikuti empat madzhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat.⁷

Muhammadiyah merupakan organisasi masyarakat yang didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 November 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan KH. Ahmad Dahlan.

Beliau adalah pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta sebagai seorang Khatib dan sebagai pedagang. Melihat keadaan ummat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Qur'an dan Hadist. Oleh karena itu beliau

⁶Hilman Handikusuma, *Op-Cit*, h. 213.

⁷[Http://www.nu.or.id/about/paham+keagamaan](http://www.nu.or.id/about/paham+keagamaan), diakses pada tanggal: 16 Desember 2017, Pukul 15:27 WIB

memberikan pengertian keagamaan dirumahnya ditengah kesibukannya sebagai Khatib dan para pedagang.

Mula-mula ajaran ini ditolak, namun berkat ketekunan dan kesabarannya, akhirnya mendapat sambutan dari keluarga dan teman dekatnya. Profesi sebagai pedagang sangat mendukung ajakan beliau, sehingga dalam waktu singkat ajakannya menyebar ke luar kampung Kauman bahkan sampai ke luar daerah dan ke luar pulau Jawa. Untuk mengorganisir kegiatan tersebut maka didirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Dan kini Muhammadiyah telah ada diseluruh pelosok tanah air.⁸

Jadi berdasarkan penegasan judul di atas skripsi ini bermaksud untuk membahas tentang kedudukan seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah terhadap pembagian harta waris menurut pandangan tokoh organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Provinsi Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang bermotivasi penulis untuk menulis membahas masalah ini dalam bentuk skripsi antara lain:

1. Alasan Objektif

- a. Dengan semakin berkembangnya teknologi maka semakin berkembangnya tingkah laku manusia, serta semakin banyak permasalahan yang timbul hingga membentuk peraturan-peraturan

⁸[Http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-50-det-sejarah.html](http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-50-det-sejarah.html), diakses pada tanggal: 16 Desember 2017, Pukul 15:35 WIB

baru. Dan akhir-akhir ini banyak kasus hamilnya seorang wanita yang terjadi diluar pernikahan yang sah menurut hukum.

- b. Untuk mengkaji lebih mendalam tentang kedudukan anak luar nikah terhadap harta waris dan membandingkan persamaan serta perbedaan menurut tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah di Provinsi Lampung.

2. Alasan Subjektif

- a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut, serta dengan tersedianya literatur yang menunjang maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.
- b. Sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara pewaris dengan ahli waris yang disebabkan oleh faktor kelahiran. Proses kelahiran seseorang tentu membutuhkan adanya hubungan kelamin antara leki-laki dan perempuan yang diperkuat dengan media akad nikah sehingga melahirkan anak yang sah. Selain anak sah dan anak adopsi atau anak angkat, dalam hukum keluarga juga dikenal Anak Luar Kawin (ALK).⁹

⁹Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Hukum Keluarga*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), h. 192.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengertian anak luar kawin dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Anak luar kawin dalam arti luas adalah anak luar pernikahan Karena perzinahan dan sumbang. Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara laki-laki dan perempuan dimana salah satunya atau keduanya terikat pernikahan dengan orang lain. Sementara anak sumbang adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya berdasarkan ketentuan Undang-undang ada larangan untuk saling menikahi.
2. Anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Status anak sebagai anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang sah merupakan suatu masalah bagi anak luar kawin tersebut, karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah karena secara hukumnya mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁰

Dalam pertalian sanak berdasarkan pertalian darah, maka yang dibicarakan adalah kedudukan anak kandung. Menurut UU No.1-1974 tentang kedudukan anak, hak dan kewajibannya terhadap orang tua di katakan dalam pasal 42-43 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat

¹⁰Prof Subekti, *Op-Cit*, h. 49.

perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Istilah “*harta kewarisan*” sebaiknya digunakan untuk harta kekayaan pewaris yang akan di bagi-bagikan kepada para waris, sedangkan istilah “*harta peninggalan*” sebaiknya digunakan untuk harta kekayaan pewaris yang penerusnya tidak terbagi-bagi atau harta peninggalan itu dapat berupa harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud. Dalam Qs. An Nisāa ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْمُتَّةِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمُتَّةِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ۖ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang

meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹¹

Harta warisan yang berwujud benda misalnya berupa bidang tanah, bangunan rumah, alat pelengkapan pakaian (adat), barang perhiasan (wanita), perabot rumah tangga, alat-alat dapur, alat-alat transport (sepeda, gerobak, kendaraan bermotor), alat-alat pertanian, senjata baik yang berasal dari harta pusaka, harta bersama (pencarian) orang tua suami isteri, harta bawaan, ternak dan sebagainya.

Harta warisan yang tidak berwujud benda misalnya berupa kedudukan atau jabatan adat, Gelar-gelar adat, hutang-hutang ilmu-ilmu ghaib, pesan, amanat, atau perjanjian.¹²

Pewarisan terhadap anak di luar perkawinan ini diatur dalam pasal 862 KUH Perdata yaitu: “Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah”. Dan menurut KUH Perdata pasal 364 yaitu: “bagian anak luar kawin harus

¹¹Dapartemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2005), h.116.

¹²Hilman Hadikusuma, *Op-Cit*, hal.213

diberikan dahulu kemudian sisanya baru di bagi-bagi antara para pewarisnya yang sah.”

Beda halnya dengan hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 menyebutkan bahwa: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Jadi implikasi hukum dari anak zina atau anak di luar nikah adalah sebagai berikut:

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, warisan dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Sebelum masuk ke inti persoalan yang ditanyakan, maka hal yang diperhatikan adalah mengenai kedudukan status hukum anak luar nikah dalam fiqh. Mayoritas ulama berpendapat bahwa anak luar nikah tidak di nasabkan kepada ayah biologisnya tetapi dinasabkan kepada ibunya.

Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa anak tersebut dianggap tidak memiliki pertalian darah dengan ayah biologisnya, sehingga tanggungjawab sepenuhnya berada di pundak sang ibu, termasuk memberi nafkah.

Keberadaan anak luar kawin jadi fenomena tersendiri saat ini karena anak tersebut semakin banyak terjadi. Kemajuan gaya hiduplah yang membuat anak luar kawin menjadi berkembang.

Dalam pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Provinsi Lampung memiliki pandangan yang sama terhadap pembagian harta waris anak luar nikah, yaitu sama-sama nasabnya terputus dari ayah biologisnya, namun ada juga yang membedakan dari kedua pendapat tokoh tersebut yaitu cara membagikan harta waris kepada anak luar nikah, menurut tokoh Nahdlatul Ulama dapat diberikan harta waris kepada anak luar nikah berupa hibah dari ayah biologisnya,¹³ sedangkan menurut tokoh Muhammadiyah dapat diberikan harta waris kepada anak luar nikah melalui wasiat wajibah dari ayah biologisnya melalui rekomendasi dari himpunan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia).¹⁴ Oleh karena itu untuk memberikan gambaran terhadap keadilan pembagian harta waris terhadap anak luar nikah maka perlulah diadakan penelitian mengenai hal tersebut.

Hukum waris Islam dan hukum waris positif telah diatur mengenai warisan bagi anak luar kawin secara berbeda-beda sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh hukum waris perdata yang tentunya bersendikan terhadap keadilan. Oleh karena itu untuk memberikan gambaran terhadap keadilan pembagian harta warisan terhadap anak luar nikah atau zina maka perlulah diadakan penelitian mengenai hal tersebut.

Sehubungan dengan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum dengan judul **“Kedudukan Anak Luar Nikah**

¹³Hasil wawancara dengan ketua Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung, Pada tanggal 06 Desember 2017, Pukul 18:29 WIB, Di Gedung 1 Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung.

¹⁴Hasil wawancara dengan wakil ketua Muhammadiyah Provinsi Lampung, Pada tanggal 06 Desember 2017, Pukul 10:30 WIB, Di Gedung Fakultas Febi UIN Raden Intan Lampung

Terhadap Harta Waris (Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Provinsi Lampung)”.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan anak luar nikah menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Provinsi Lampung ?
2. Bagaimanakah pembagian harta waris anak luar nikah menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Provinsi Lampung ?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dalam penelitian ini:
 - a. Untuk mengetahui kedudukan anak luar nikah menurut pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
 - b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tentang pembagian harta waris anak luar nikah menurut pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai suatu sarana untuk menambah ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum terhadap masalah harta waris, khususnya terhadap anak yang lahir dari hasil perzinahan menurut pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
 - b. Memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar sarjana Hukum dibidang Al Ahwal Al Syakhsiyah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dan mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dengan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut:¹⁵

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis lapangan (*field research*), yaitu metode yang digunakan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan satu unit sosial, individu, kelompok lembaga dan masyarakat.¹⁶

b. Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitik, yang mengungkapkan peraturan

¹⁵Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 21-22.

¹⁶Kartini Kartono, *Pengantar Metode Research Sosial*, (Bandung: MandarMaju, 1986), h.

perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek pilihan.¹⁷

Dalam hal ini penulis menggambarkan apa adanya mengenai kedudukan anak luar nikah terhadap pembagian harta waris menurut tokoh Nahdlatul Ulama Muhammadiyah di Provinsi Lampung.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah penelitian yang di peroleh dari hasil wawancara dengan tokoh organisasi masyarakat Islam yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer berupa buku-buku dan literatur tentang perkawinan, arsip-arsip, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta waris anak luar nikah.

3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, Dalam penelitian ini yang akan menjadi populasi adalah tokoh organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama dan

¹⁷Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 105.

Muhammadiyah yang memberikan pandangan tentang kedudukan anak luar nikah terhadap harta waris. Sedangkan yang akan menjadi sampel hanya beberapa anggota dari tokoh organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

4. Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data dari lokasi penelitian, digunakan beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena social dan gejala-gejala dengan jalan pengamatan dan pencatatan.¹⁸

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung kearah penelitan. Adapun teknik observasi menjadi dua bentuk sebagai berikut:

1) Teknik observasi langsung

Teknik observasi langsung adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang di selidiki baik pengamat itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan.

2) Teknik observasi tidak langsung

Teknik observasi tidak langsung adalah teknik pengumpulan data yang dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala

¹⁸*Ibid*, h. 142.

subjek yang diselidiki dengan perantara dengan sebuah alat, baik alat yang sudah ada maupun yang sengaja di buat untuk keperluan yang khusus itu.¹⁹

b. Metode Interview

Metode interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.²⁰

Pendapat lain menyatakan bahwa interview adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa interview merupakan salah satu alat untuk memperoleh informasi dengan jalan mengadakan komunikasi langsung antar dua orang atau lebih serta dilakukan secara lisan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.²¹

5. Pengelolaan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat dengan menggunakan tolak ukur agama (dalil-dalil Al-Qur'an, Hadist, kaidah-kaidah

¹⁹Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 26.

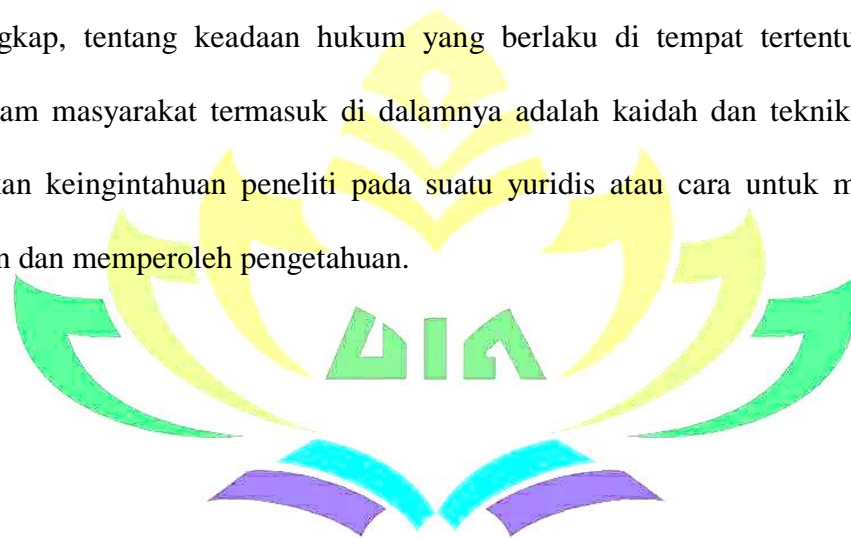
²⁰Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 113.

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 118.

ushul fiqh yang berlaku di masyarakat) sebagai pembenar dan pemberi norma terhadap masalah yang menjadi pembahasan sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu boleh atau tidak dengan ketentuan syariat.

6. Analisis Data

Data yang di analisis secara kualitatif yaitu upaya-upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap, tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu yang terjadidalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu yuridis atau cara untuk mencari kebenaran dan memperoleh pengetahuan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

BAB II

KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH TERHADAP HARTA WARIS

A. Pengertian dan Kedudukan Anak Luar Nikah

1. Pengertian Anak Luar Nikah

Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Pengertian di luar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, dan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dianutnya.²²

Di dalam sebuah buku karya Abdul Manan yang berjudul *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, menjelaskan bahwa:

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.²³

²²D.Y. Witanto, *Hukum keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2012), h. 71.

²³Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2008), h. 80.

Dengan kata lain, hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri tersebut tidak diakui Negara hukum Indonesia, atau dengan kata lainnya lagi: sah menurut agama dan tidak sah menurut Undang-Undang.²⁴

Konsep zina dalam pengertian hukum barat sangat dipengaruhi oleh adanya asas monogami yang berlaku dalam hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 27 KUHPerdata yang rumusannya berbunyi:

“Pada waktu yang sama seorang lelaki hanya boleh terikat oleh perkawinan dengan satu orang perempuan saja seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.”

Menurut pasal 284 KUHP jo. Pasal 27 KUHPerdata seseorang dapat dikatakan telah berbuat zina jika salah seorang atau kedua-duanya sedang terikat oleh perkawinan dengan yang lain, sehingga ikatan perkawinan merupakan unsur yang menentukan seseorang dapat dikatakan melakukan zina atau tidak. Hal ini sangat berbeda dengan konsep zina menurut hukum Islam. Berdasarkan terminologi Islam perbuatan zina tidak hanya ditentukan oleh keadaan bahwa si laki-laki atau si perempuan sedang berstatus menikah dengan perempuan atau laki-laki lain, namun setiap hubungan suami istri yang dilakukan oleh pasangan yang tidak dalam ikatan perkawinan terlepas apakah ia sedang berstatus menikah dengan yang lain atau mereka masih berstatus perjaka dan gadis, tetap dianggap sebagai perbuatan zina.²⁵

²⁴Habiburrahman, *Anak Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, artikel pada Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, edisi no.75, 2012, h. 40.

²⁵Lihat D.Y. Witanto, *Op. Cit*, h. 71-72

Mengenai kedudukan anak yang dibuahkan akibat zina atau akibat pemerkosaan yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa anak yang dibuahkan di luar perkawinan yang sah adalah hanya mempunyai hubungan hukum (*nasab*) dengan ibunya dan keluarga ibunya meskipun ia dilahirkan dalam perkawinan yang sah, dan ayah biologisnya telah menjadi suami ibunya.

Akan tetapi, pengaruh *sekularisme* dan teori *receptie* benar-benar telah mewarnai RUU-HM-PA-Bidang Perkawinan Tahun 2007. Hal itu dapat dilihat pada Pasal 96 yang merumuskan, bahwa anak tersebut berkedudukan sebagai anak sah yang mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan suami ibunya, baik laki-laki yang menikahi ibunya adalah ayah biologisnya ataupun bukan, hal ini tentu tidak sesuai dengan Hukum Islam.

Dalam hal perkawinan perempuan hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48, maka anak yang lahir dalam waktu kurang dari 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak akad nikah, hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya. Batas minimal usia perkawinan yang menentukan sah atau tidak sahnya anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah berdasarkan jumlah 180 hari, bukan enam bulan *Qamariyah*.²⁶

Para ulama madzhab sepakat bahwa bila zina itu telah terbukti pengertian yang sebenarnya dengan caranya seperti yang telah dijelaskan, tidak ada hak waris-mewarisi antara anak yang dilahirkan melalui perzinaan dengan orang tuanya. Sebab, anak tersebut secara syariat tidak memiliki kaitan nasab yang sah

²⁶Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.166

dengannya. Akan tetapi, para ulama madzhab menghadapi kesulitan besar sebagai konsekuensi dari fatwa mereka bahwa anak zina tidak berhak menerima harta waris. Manakala anak zina itu tidak memiliki kaitan nasab secara *syar'i* dengan orangtuanya, laki-laki yang melakukan zina tersebut tidak haram mengawini anak perempuan hasil zinanya dan apabila anak laki-laki zina tidak haram mengawini saudara perempuannya dan bibinya, sepanjang mereka dianggap tidak muhrim. Anak zina itu dianggap sebagai anak yang sah, sehingga diberikan seluruh haknya sebagaimana yang diberikan kepada anak sah lainnya, termasuk hak waris dan nafkah, atau dipandang sebagai anak tidak sah sehingga diberikan pula hak-haknya sebagaimana orang-orang yang tidak mempunyai hubungan nasab, termasuk boleh menikah antara bapak dan anak perempuannya atau dia dan saudara perempuannya sendiri. Oleh karena itu, kita lihat para ulama madzhab, sesudah sepakat bahwa si anak tidak mendapatkan waris, mereka berbeda pendapat dalam yang lain. Maliki dan Syafi'i mengatakan bahwa seorang laki-laki boleh mengawini anak perempuannya, cucu perempuan, saudara perempuan, keponakan perempuan, hasil perbuatan zina. Sebab, wanita-wanita tersebut tidak mempunyai kaitan nasab secara *syar'i* dengannya.²⁷

2. Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Islam

²⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 188-189.

Hukum Islam telah mendapatkan bahwa semua anak yang dilahirkan tanpa melalui pernikahan atau anak yang lahir diluar perkawinan atau anak yang lahir diluar perkawinan yang sah yang telah diatur didalam syariat hukum Islam disebut dengan anak zina. Pengertian zina itu sendiri adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di luar nikah. Sedangkan anak zina ialah anak yang dikandung dan dilahirkan oleh ibunya dari seorang laki-laki yang menggaulinya tanpa adanya pernikahan antara keduanya. Dalam hal ini anak tersebut lahir dengan keadaan suci tidak menanggung dosa dari perbuatan kedua orang tuanya yang telah melakukan zina tersebut.

Sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
(رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Anak itu haknya (laki-laki) yang memiliki tempat tidur dan bagi yang berzina tidak memiliki tempat apapun (atas anak tersebut). (HR. Bukhori dan Muslim)”²⁸

Maksud dari hadis di atas adalah bahwa anak tersebut milik suami yang sah meskipun lahir dari zina isterinya dengan laki-laki lain, sedangkan bagi laki-laki yang menzinai istrinya tidak mempunyai hak apapun terhadap anak tersebut.

Selanjutnya Islam menetapkan tenggang waktu untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak. Apabila ada seorang perempuan melahirkan anak dalam keadaan pernikahan yang sah dengan seorang laki-laki, akan tetapi jarak waktu

²⁸Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid 1, (Semarang: Toha Putera), h. 619.

antara terjadinya pernikahan dengan saat melahirkan kurang dari 6 (enam) bulan, maka anak yang dilahirkan itu bukanlah anak yang sah bagi suami ibunya. Demikian pula apabila seorang janda yang ditinggalkan mati oleh suaminya kemudian melahirkan anak setelah lebih dari satu tahun dari kematian suaminya, maka anak yang dilahirkan bukan lah anak sah bagi almarhum suami perempuan tersebut.²⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam anak sah terdapat pada Pasal 99a yang menyatakan “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”.³⁰ Sehingga dapat disimpulkan dari pasal tersebut menurut Kompilasi Hukum Islam apabila ada anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah maka dapat dinyatakan bahwa anak tersebut adalah anak tidak sah atau anak zina. Sedangkan kedudukan anak menurut hukum Islam sebagaimana telah dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya sama dengan UU Perkawinan karena dimana Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.³¹ Dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Dalam hukum Islam anak yang dilahirkan diluar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan pihak ibunya, baik dalam hal pemeliharaan ataupun

²⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), h. 78.

³⁰ H. Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 137

³¹ H. Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 137.

dalam hal pewarisan. Hubungan tersebut diperoleh dengan sendirinya, artinya tidak diperlukan suatu perbuatan hukum tertentu. Seperti ditentukan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Menasabkan anak kepada ibu biologisnya, baik yang dikandungnya sendiri ataupun dititipkan pada perempuan lain, berarti memelihara pertalian darah (nasal) antara anak dengan ibunya yang merupakan asal-usul anak sesuai sunnatullah. Demikian juga menasabkan anak kepada ayah biologisnya berarti pula memelihara pertalian darah (nasal) antara anak dengan ayahnya yang merupakan asal-usulnya sesuai sunnatullah. Meniadakan (memutuskan) hubungan darah anak dengan ibu biologis dan ayah biologis berarti melawan sunnatullah.³²

Oleh sebab itu, komentar sebagian warga masyarakat, anak zina tidak boleh diperlakukan secara khusus apa lagi dicap sebagai anak haram, anak kotor, anak jadah, dan beberapa gelar negatif lain, termasuk zina untuk selamanya tidak akan pernah mempunyai nasab dengan ayah biologisnya, dan akan sangat merugikan bagi perkembangan psikis anak tersebut.

Apabila dibaca secara sekilas seakan-akan kalimat tersebut (Pasal 42 UU No.1 Tahun 1974) memang benar dan sejalan dengan UUD 1945, HAM dan UU Perlindungan Anak. Namun jika direnungi dan ditelaah secara mendalam, pada dasarnya pernyataan seperti ini, ternyata juga tidak tepat. Sebab aturan hukum Islam tentang anak zina yang tidak akan memiliki hubungan nasab dengan ayah

³²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 120.

biologisnya dan tidak akan bisa menerima hak nafkah, hak perwalian dan hak waris dari pewarisnya bukan sebagai hukuman atas anak yang tidak berdosa itu. Akan tetapi, sebagai hukuman bagi ayah biologisnya yang biasanya ia akan merasa senang dengan lahirnya anak, lalu ia bisa berbangga dengan anaknya, sehingga rasa bangga orangtuanya ini diwujudkan dengan adanya hak ayah biologisnya untuk memberikan hak nasab, hak nafkah, memberikan hak perwalian, dan memberikan kewarisan untuk anaknya. Orangtua, khususnya ayah biologi dilarang memiliki sikap bangga atas anak biologisnya, sebab sang ayah biologisnya telah melakukan pelanggaran besar berupa perzinaan yang dilakukan berdua dengan ibu anak itu. Sang ayah biologis bukan hanya dilarang berbangga dengan anak yang dilahirkannya, melainkan ia juga dengan keharusan bersedia untuk tidak memberikan hak perwalian, hak kewarisan dan hak nafkahnya kepada anak biologisnya. Hal ini dimaksudkan sebagai konsekuensi logis dari perbuatan zina yang pernah dilakukannya.³³

Ishaq bin Rahawailh, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim berpendapat, menetapkan anak yang lahir karena perbuatan zina sebagai keturunan orang yang mengaku, sebenarnya sesuai dengan kenyataan perbuatan zina orang itu dengan ibu si anak, sebagaimana penetapan nasab anak itu kepada ibunya. Penetapan itu dimaksud agar si anak tidak terlantar, tidak mendapat mudharat, dan tidak terkena

³³M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012), h. 165.

aib karena perbuatan yang tidak ia lakukan. Sebab, orang yang tidak berbuat dosa tidak akan memikul dosa orang lain.³⁴

Hak pemeliharaan nasab atau keturunan (*hifz al-nasl*), merupakan salah satu bentuk dari hak pemeliharaan nasab dalam Islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan, kehormatan anak dapat diwujudkan dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari orang tua kandungnya, oleh karena itu dalam Islam pengangkatan seorang anak tidak boleh sampai menyebabkan anak tersebut menghilangkan asal-usul keturunannya. Allah menegaskan dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 5 :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”³⁵

³⁴Halid Abdul Hakim, *Ahkamul-Mawarits fil-fiqhil-islami*, terjemahan Addy Aldizar dan Fathurrahman, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 401.

³⁵Dapartemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjamahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2005), h. 311

Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik pemikiran bahwa hak pemeliharaan nasab anak dalam pandangan Islam meliputi beberapa hal Pertama, demi menjaga hak dan martabat anak, ayah kandung tidak diganti dengan nama orang lain meskipun anak tersebut telah menjadi anak angkat. Kedua, hak dan kehormatan terkait dengan kejiwaan anak, sebab jika anak dikenal sebagai anak yang tak berbakat atau keturunan yang jelas maka ia akan mengalami masalah besar dalam pertumbuhan kepribadiannya kelak. Bahkan dalam pandangan Islam demi kepentingan terbaik bagi anak, maka pemberian akta kelahiran adalah wajib hukumnya.

D.Y. Witanto sebagai salah satu ahli hukum kemudian menjelaskan lebih lanjut mengenai macam-macam anak luar nikah, yaitu:

a. Anak luar kawin yang dapat diakui

Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dapat diakui oleh orangtua biologisnya sehingga memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orangtuanya.

b. Anak *Mula'nah*

Anak *Mula'nah* adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang *dili'an* oleh suaminya, maka status anak tersebut berubah menjadi anak yang tidak sah (*mula'nah*) dan kedudukannya dimata hukum sama dengan zina yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya.

c. Anak Syubhat

Anak Syubhat adalah anak yang lahir dari suatu hubungan badan seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar kekeliruan dan bukan disengaja atau direkayasa.³⁶

Hubungan nasab dalam Islam, secara etimologis nasab berarti *al-qarabah* (kekerabatan), sedangkan nasab secara terminologis para ulama tidak merumuskan definisinya. Mereka mencukupkan makna nasab secara umum yang digunakan pada makna etimologisnya, yaitu *al-qarabah bayna syakhsain* (kekerabatan di antara dua orang) tanpa memberikan definisi terminologinya.³⁷

Nasab dalam hukum Islam merupakan sesuatu yang sangat urgen, nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah swt kepada hamba-Nya, sebagaimana firman dalam QS. Al-Furqan ayat 54 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG
Artinya: “dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa.”³⁸

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa nasab merupakan suatu nikmat yang berasal dari Allah. Dan perlu diketahui bahwasanya nasab juga merupakan salah satu dari lima *maqasid al-syariah*.³⁹

³⁶Lihat D.Y. Witanto, *Op. Cit*, h. 45-48.

³⁷Akhmad Jalaludin, “*Nasab: Antara hubungan Darah dan Hukum serta Implikasinya terhadap Kewarisan*”, Ishraqi. (Surakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 10. No. 1, Juni, 2012), h. 67.

³⁸Dapartemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2005), h.567

Dalam padangan hukum Islam empat syarat agar nasab seorang anak dianggap sah, yaitu:

- a. Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil.
- b. Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan.
- c. Anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan.
- d. Suami tidak mengingkari anak tersebut.⁴⁰

Timbul persoalan baru menyangkut status anak diluar kawin (zina) terhadap orangtua biologisnya. Persoalan yang timbul adalah tentang waris dan nafkah bagi anak tersebut serta timbulnya hak anak luar perkawinan dalam masalah wali, namun apakah ada solusi untuk memberikan harta waris untuk anak luar perkawinan dari ayah biologisnya walaupun anak tersebut telah terbukti dengan adanya hubungan perdata antara anak yang dihasilkan diluar pernikahan dengan ayahnya yang bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan maupun teknologi seperti DNA yang dapat dilakukan pada zaman modern ini.

B. Kewarisan Anak Luar Nikah

Harta warisan adalah harta benda peninggalan dari pewaris. Harta benda tersebut dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, berwujud dan

³⁹Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirul: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t), juz. II, h. 12-23.

⁴⁰Amiur Nurrudin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 276.

tidak berwujud. Jenis harta warisan adalah harta kekayaan, hak kekayaan intelektual, merk dagang atau perusahaan, dan hak kebendaan. Adapun harta warisan adalah segala harta kekayaan peninggalan pewaris setelah dikurangi dengan semua utang dan wasiat pewaris. Harta warisan sering disebut dengan “warisan” saja. Warisan menjadi hak ahli waris.⁴¹

Hukum kewarisan dalam Islam lebih berkonotasi strategis untuk kepentingan dakwah, Tujuannya adalah, untuk menjalin ikatan persaudaraan demi perjuangan dan keberhasilan misi Islam. Pertimbangannya, kekuatan Islam pada waktu itu, dirasakan masih sangat lemah, baik sebagai komunitas bangsa maupun dalam penetapan ajaran-ajarannya, yang masih dalam dinamika pertumbuhan. Oleh karena itu, dasar-dasar pewarisan yang digunakan pada masa awal-awal Islam yaitu: pertalian kerabat (*al-qarabah*); janji prasetia (*al-hilf wa al-mu'aqadah*); pengangkatan anak (*al-tabani*) hijrah dari mekah ke madinah; serta ikatan persaudaraan (*al-muakhah*) antara orang-orang muhajrin (pendatang) dan orang-orang ansar, yaitu orang-orang madina yang memberi pertolongan kepada kaum Muhajirin dari mekah di madinah.⁴² Hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan “*farâidh*”. Kata *farâidh* adalah bentuk jamak dari *faridah* yang berasal dari kata *fardhu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah).⁴³ Sehingga secara singkat ilmu *farâidh* atau *al-mirats* dapat didefinisikan sebagai ilmu

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 221.

⁴² Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 14.

⁴³ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), h. 49.

pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris.⁴⁴

Hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari konstruksi ajaran agama Islam yang secara *letter lijk* termuat dalam teks-teks ayat suci Al-Qur'an. Al-Qur'an telah mengatur mengenai cara pembagian harta waris, ahli waris dan syarat-syarat sebagai ahli waris, wasiat dan hal-hal yang secara rinci membahas mengenai waris. Idealnya ketentuan yang telah ditentukan oleh Alquran tersebut harus dilaksanakan. Akan tetapi karena berbagai faktor yang melingkupi, ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, sehingga timbul pemahaman terhadap keberadaan hukum waris Islam seakan hanya sebatas rentetan aturan tanpa adanya praktik. Padahal jika dikaji secara mendalam, hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam.

Berdasarkan fakta tersebut, kajian ini berusaha menjelaskan konvergensi pembagian harta waris dalam hukum Islam dan faktor yang mempengaruhi tidak dilaksanakannya hukum waris Islam terlebih dalam masalah pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan yang mengalami kesenjangan dinamik baik dalam nas maupun hukum positif. Kajian ini diawali dengan sejarah kewarisan, kewarisan Islam, asas kewarisan Islam kemudian pembagian waris dalam praktik serta konvergensinya.⁴⁵

Kewarisan anak luar nikah menurut hukum Islam bahwa anak zina, baik dia laki-laki atau pun perempuan tidak di akui hubungan darahnya dengan

⁴⁴Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), h. 50.

⁴⁵Sakirman, "Konvergensi Pembagian Harta Waris dalam Hukum Islam", *al- 'Adalah*, Vol. XXI, No. 2, Desember 2016, h. 157-159.

ayahnya, maka dia tidak mewarisi harta ayahnya dan tidak pula dari seorang kerabat ayahnya sebagaimana ayahnya tidak mewarisinya lantaran tidak ada sebab pusaka mempusakai antara keduanya, yaitu hubungan darah. Karena itu anak zina itu hanya diakui hubungan darahnya dengan ibunya, maka dia mewarisi harta ibunya sebagai mana ia mewarisi kerabat-kerabat ibunya, demikian pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya”.⁴⁶

Jadi anak yang lahir karena perbuatan zina adalah keturunan dari ibunya, karena jelas terlihat dan tidak diragukan lagi . Sementara itu, untuk menentukan laki-laki yang mempunyai hubungan nasab dengannya, dapat dilakukan jika ada seorang laki-laki yang mengakuinya anak tetapi, orang itu tidak mengakuinya lahir dari perbuatan zina dengan ibu si anak. Anak itu dapat dinasabkan kepadanya, jika syarat syaratnya terpenuhi. Namun, jika ada orang yang berkata bahwa anak itu adalah anaknya dari perbuatan zina, menurut jumhur ulama, anak itu tidak bisa di nasabkan kepadanya. Sebab, nasab atau keturunan adalah sebuah nikmat dan itu tidak bisa diperoleh dari perbuatan tercela. Akan tetapi, balasan yang sesuai untuk perbuatan zina adalah azab.

Adapun dalil yang dijadikan pegangan oleh jumhur ulama lebih kuat karena ada riwayat dari ‘Amr bin Syu’aib, yaitu Nabi SAW, bersabda:

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيْمَانَ جُلِّ
عَنْ

⁴⁶Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam

عَا هَرَّ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَأُولَٰدُ زِنَا ، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ (رواه الترمذی)

Artinya: “Lelaki manapun yang berbuat zina dengan seorang wanita merdeka atau budak, maka anak yang lahir adalah anak zina, tidak bisa mewarisi atau diwarisi.” (HR. Turmudzi)⁴⁷

Golongan ahli waris ada 25 ahli waris yang diatur dalam ketentuan hukum waris Islam, yang dapat mewarisi harta pewaris yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan yaitu:

Ahli waris Laki-laki terdiri dari: Anak laki-laki; Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah; Ayah; Kakek dari ayah dan terus ke atas; Saudara laki-laki kandung; Saudara laki-laki seayah; Saudara laki-laki seibu; Anak laki-laki saudara laki-laki kandung; Anak laki-laki saudara laki-laki seayah; Paman yang sekandung dengan ayah; Paman yang seayah dengan ayah; Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah; Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah; Suami; Orang laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya.⁴⁸ Jika ahli waris laki-laki tersebut semua ada, maka yang mendapat bagian hanya tiga orang, yaitu:

- a. Anak laki-laki
- b. Suami
- c. Ayah

Hal-hal mendetail tentang kewarisan Islam, apakah dalam pewahyuan Ilahi maupun sunnah Nabi, berjalan secara regular selama 22 tahun dalam periode

⁴⁷HR. At-Tirmidzi, *Kitab a-Faraidh*, 4/428 dan dishahihkan al- Albani dalam shahih sunan at-Tirmidzi dan shahih al-Jami, no. 2723

⁴⁸Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shohiihu fiqhissunnati Waadillatahu wa Taudhihu madzhaahibil Aimmati*, terjemahan Ade Ichwan Ali, *Tuntunan Praktis Hukum Waris*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2009), h. 21.

antara permulaan dakwah Muhammad pada tahun 610 M sampai wafatnya pada tahun 632 M. Dengan mencermati hal-hal tersebut dalam tataran kronologisnya, dapat melihat tiga tahap perkembangan hukum waris. *Pertama*, selama periode Makkah (610-622 M), setidaknya ada enam ayat yang mengatur berbagai aspek kewarisan diwahyukan kepada Muhammad. Enam ayat tersebut adalah QS. Al-Baqarah ayat 180 memerintahkan orang yang akan mati untuk meninggalkan wasiat bagi ibu, bapak, dan karib kerabatnya. Ayat 181 menyerahkan pertanggung jawaban (dosa) orang yang mengubah wasiat kepada Allah. Ayat 182 mendorong rekonsiliasi dengan pihak-pihak yang tidak setuju terhadap pembagian suatu warisan. Ayat 240 mengizinkan orang yang berwasiat untuk membuat ketetapan bahwa jandanya diberi nafkah maksimum setahun, dan membiarkan tinggal di rumah almarhum suaminya, dan terakhir QS. Al-Mâidah ayat 105-106 menetapkan agar wasiat dan testamen, agar valid, harus dibuat atau dikatakan dihadapan dua orang saksi yang dipercaya. Enam ayat ini merefleksikan suatu sistem waris yang relatif membebaskan orang untuk menentukan siapa saja ahli warisnya dan berapa orang untuk menentukan siapa saja ahli warisnya dan berapa banyak mereka memperoleh bagiannya. *Kedua*, segera sesudah hijrah ke Madinah pada tahun 622 M, nabi Muhammad menerima serial kedua pewahyuan yang menetapkan aturan-aturan wajib untuk pembagian waris, yaitu tertuang dalam QS. An-Nisâ ayat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 176 yang merefleksikan suatu konsepsi tentang karakteristik kewarisan yang sangat berbeda dengan apa yang termuat dalam tahap pertama (yang kemudian disebut dengan ayat-ayat wasiat). *Ketiga*, setelah *Fath al-Makkah* pada tahun 630 M, Muhammad menjelaskan hubungan

antara seri pewahyuan pertama dan kedua dengan mengeluarkan satu *statement* yang membatasi jumlah pembuatan wasiat. Tradisi Islam mengajarkan bahwa pada saat nabi Muhammad wafat, telah meletakkan pondasi '*ilm al-farâidh* (ilmu tentang bagian-bagian). Pondasi ini kemudian disempurnakan dalam proses tiga belas tahun berikutnya oleh para sahabat seperti 'Umar, 'Alî, Zaid bin Tsabit, Ibn Mas'ûd dan Abû Mûsa.

Aturan-aturan hukum kewarisan Islam sebagaimana pada tahap kedua di atas telah diatur dalam Alquran, tepatnya dalam surat An-Nisâ ayat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 176. Dibandingkan dengan ayat hukum yang lain dalam Alquran, ayat-ayat hukum waris merupakan ayat-ayat hukum yang paling tegas dan rinci isi kandungannya. Dalam surat An-Nisâ ayat 7 memberikan ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas warisan orang tua ataupun kerabatnya. Ketentuan tersebut merupakan dekonstruksi terhadap kebiasaan bangsa Arab yang hanya memberikan warisan kepada laki-laki yang sanggup memanggul senjata membela kehormatan kabilahnya. Anak kecil, orang tua dan perempuan karena tidak mampu memanggul senjata maka tidak berhak atas warisan sama sekali. Surat An-Nisâ ayat 8 memerintahkan agar sanak kerabat, anak yatim dan orang miskin yang hadir dan menyaksikan pembagian harta warisan diberi sejumlah harta sekedar untuk dapat ikut menikmati harta warisan yang baru saja dibagi. Realisasi dari ajaran ini menurut Ahmad Azhar Basyir, dapat dikembangkan secara kenegaraan hingga dimungkinkan menjadi dasar kuat untuk dikeluarkannya undang-undang atau peraturan wajib pajak atas harta warisan.

Surat An-Nisâ ayat 9 memperingatkan agar orang senantiasa memperhatikan anak cucu yang ditinggalkan agar jangan sampai mereka mengalami kesempitan hidup sebagai akibat kesalahan orang tua dalam membelanjakan hartanya. Surat An-Nisâ ayat 10 memberikan peringatan agar berhati-hati dalam memelihara harta warisan yang menjadi hak anak yatim, jangan sampai termakan dengan cara tidak sah. Karena jika itu terjadi sama halnya dengan memakan bara api neraka. Sedangkan Surat An-Nisâ ayat 11 dan 12 secara rinci menjelaskan bagian masing-masing ahli waris. Diawali pada ayat 11 bahwa bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan. Begitu juga pada ayat 176. Adapun bagian tertentu yang dimaksud adalah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$. Surat An-Nisâ ayat 13 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut termasuk hal yang bersifat *ta'abudi* yang wajib dilaksanakan karena telah menjadi ketentuan Al-Quran.

Keberadaan ayat-ayat di atas, selain menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagiannya dan kapan harta peninggalan boleh dibagi, ayat-ayat hukum kewarisan juga tampak secara eksplisit maupun implisit memastikan jaminan keharusan kaum perempuan (terutama ibu, istri, dan anak perempuan bahkan saudara perempuan dalam kondisi tertentu) untuk mendapatkan warisan.⁴⁹

Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis rasulullah SAW tentang hukum kewarisan Islam sebagaimana telah di uraikan, maka terkandung beberapa asas yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan hukum kewarisan tersebut.

⁴⁹Sakirman, *Op. Cit*, h. 157-159.

Muhammad Daud Ali dan Amir Syarifuddin masing-masing menjelaskan bahwa ada lima asas kewarisan Islam, yaitu:

- a. Asas *ijbari*, yaitu peralihan harta seorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya yang dalam pengertian hukum Islam berlangsung secara *ijbari*.

Hal ini, mengandung pengertian bahwa peralihan harta warisan seorang pewaris yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya sesuai ketetapan Allah SWT tanpa digantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris dengan bagian yang telah ditetapkan. Dengan demikian, unsure kewajiban (*ijbari*) dalam hukum kewarisan Islam adalah terlihat dari segi ahli waris berhak menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya, sesuai dengan jumlah yang telah diatur dalam Al-Qur'an.

- b. Asas bilateral, yaitu seorang menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat, baik dari kerabat garis keturunan laki-laki maupun dari pihak kerabat garis keturunan perempuan.

Asas tersebut, mengandung pengertian bahwa seorang menjadi ahli waris dari kedua garis kerabat, yakni dari pihak ayah dan dari pihak ibu. Asas ini dapat dilihat dalam QS. An-Nisā' (4): 7 yang maksudnya, bahwa untuk laki-laki ada bagian dari peninggalan ibu bapaknya dan karib kerabatnya. Untuk perempuan juga ada bagian dari peninggalan ibu bapaknya dan karib kerabatnya, baik peninggalan itu sedikit atau banyak sebagai yang telah ditetapkan.

- c. Asas individual, yaitu harta peninggalan yang di tinggalkan oleh yang meninggal dunia, dibagi secara individual atau secara pribadi langsung kepada masing-masing individu.

Asas ini pula mengandung pengertian bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki oleh masing-masing ahli waris secara perorangan menurut ketentuan bagiannya masing-masing, sebab hukum kewarisan Islam telah ditetapkan bagian masing-masing ahli waris secara terperinci sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisā' (4): 7, 11, 12, dan 176.⁵⁰

- d. Asas keadilan berimbang, yaitu baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris, mewarisi harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Asas tersebut mengandung pula pengertian bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang di peroleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing kelak dalam kehidupan kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam system hukum kewairsan Islam, harta peninggalan/kewarisan yang diterima oleh ahli waris, pada prinsipnya bertujuan untuk kelanjutan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarganya. Secara universal laki-laki memikul kewajiban ganda, yaitu terhadap dirinya dan keluarganya serta nkerabatnya yang ada dalam rumah

⁵⁰Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), h. 45-46.

tangganya. Adapun perempuan pada umumnya selalu menjadi tanggungan laki-laki, sebagaimana disebutkan dalam QS. *an-Nisā'* (4): 34, QS. *Al-Baqarah* (2): 215 dan 233, serta QS. *Ath-Thalaq* (65): 7. Dengan demikian, perempuan tidak dibebani tanggung jawab untuk member nafkah atas seseorang, berbeda dengan laki-laki yang harus memberi mahar kepada istrinya, dan dibebani member nafkah berupa tempat tinggal, makanan, pakaian, pengobatan, serta biaya pelayanan kepada istri dan anak-anaknya.

- e. Asas kewarisan semata akibat kematian, yaitu peralihan peninggalan atau harta seseorang kepada orang lain dengan status kewarisan berlaku sesudah meninggalnya pewaris.

Hal ini berarti bahwa peralihan kewarisan itu berlaku sesudah matinya seseorang (pewaris). Jadi segala bentuk peralihan harta di saat seseorang masih hidup tidak termasuk kewarisan menurut hukum Islam. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam hanya menganut satu bentuk kewarisan yakni kewarisan akibat kematian, sehingga peralihan harta dalam bentuk hibah dan wasiat tidak termasuk dalam kewarisan.

Selain asas-asas tersebut, Idris Djakfar dan Taufik Yahya menambahkan asas lagi, yaitu:

- f. Asas personalitas keislaman, yaitu asas yang menyatakan bahwa peralihan hanya terjadi bila antara ahli waris dan pewaris sama-sama menganut agama Islam.

Hal ini mengandung pengertian bahwa jika antara ahli waris dan pewaris terdapat non-Muslim dan Muslim berarti peralihan harta warisan tidak dapat dilaksanakan, dasarnya Hadis Rasulullah SAW yang artinya: “Orang Islam tidak menerima pusaka dari orang kafir dan orang kafir tidak menerima pusaka dari orang Islam.”⁵¹

Jadi asas personalitas keislaman hanya berlaku terhadap ahli waris yang bagiannya tertentu yang telah ditetapkan sesuai Al-Qur'an dan Sunnah atau Hadis sebagaimana telah dijabarkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Demikian pula Hj. Harijah Damis mengajukan salah satu asas yang berbeda, yaitu asas pembagian seketika sehingga asas tersebut bertambah sebagai berikut:

- g. Asas pembagian seketika, yaitu harta warisan pewaris segera diperhitungkan dan dibandingkan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal.

Hal ini mengandung pengertian bahwa harta warisan pewaris jangan sampai tertinggal dalam jangka waktu lama belum diperhitungkan dan belum dibagikan kepada ahli waris, tapi harus lebih cepat diperhitungkan dan dibagikan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal. Jika tertinggal dalam jangka waktu lama belum diperhitungkan dan belum dibagikan dikhawatirkan antara para ahli waris maupun orang-orang yang terkait dengan harta warisan tersebut, dapat memicu terjadinya perselisihan atau konflik yang berkepanjangan antara para ahli waris,

⁵¹*Ibid*, h. 48-49.

sebab terjadinya sengketa harta warisan di Pengadilan Agama disebabkan harta warisan tidak dibandingkan dalam jangka waktu lama, apalagi jika harta warisan tersebut telah dijual oleh orang yang menguasai, ataukah dihibahkan kepada orang lain, ataukah digadaikan untuk kepentingan peribadinya yang tidak ada persetujuan dari para ahli waris, sehingga harta warisan bermasalah karena tidak jelas lagi batasannya.

- h. Asas penyebarluasan dengan prioritas di lingkup keluarga, adalah pembagian kewarisan memungkinkan untuk disebarluaskan yang bukan hanya pada taraf anak yang berhak mendapat harta warisan, tetapi suami, istri, orangtua, saudara-saudara bahkan cucu ke bawah, orangtua terus ke atas dan keturunan saudara-saudara sama-sama tercakup. Namun penyebarluasan tersebut tetap di batasi pada keluarga terdekat baik sebab pernikahan maupun sebab hubungan keturunan (*nasab*) yang sah.
- i. Asas persamaan hak dan perbedaan bagian, adalah persamaan dalam hak mewarisi harta ibu bapak dan kerabatnya yang dilihat dari jenis kelamin serta usia siap-tiap ahli waris, seperti laki-laki dan perempuan, serta dewasa dengan anak-anak sama-sama berhak mewarisi dengan perbedaan porsi bagian masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Dengan demikian laki-laki dan perempuan sama-sama berhak untuk mewarisi harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, begitu pula orang dewasa dengan anak-anak.

- j. Asas ahli waris langsung (*eigen hoofde*), adalah ahli waris yang disebut pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- k. Asas ahli waris pengganti (*Plaatsvervulling*), adalah ahli waris yang diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebutkan dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Diantaranya keturunan dari anak laki-laki atau anak perempuan, keturunan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- l. Asas hubungan darah, yakni hubungan darah akibat perkawinan sah, perkawinan subhat dan atas pengakuan anak (asas fiqh Islam).
- m. Asas wasiat wajibah, adalah anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat dapat diberi wasiat wajibah oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* maksimal 1/3 bagian dari harta warisan, berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- n. Asas egaliter, maksudnya kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapat wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian, dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya.
- o. Asas retroaktif terbatas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak berlaku surut dalam arti apabila harta warisan telah dibagi secara riil (bukan hanya

pembagian di atas kertas) sebelum Kompilasi Hukum Islam (KHI) diberlakukan, maka keluarga yang mempunyai hubungan darah karena ahli waris pengganti tidak dapat mengajukan waris. Apabila harta warisan belum dibagi secara riil, maka terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum Kompilasi Hukum Islam (KHI) lahir, dengan dendirinya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat berlaku surut.

Demikian inilah sebagai perkembangan pembagian harta warisan Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang implementasinya dilakukan di Pengadilan Agama.⁵²

Mengenai pewarisan anak luar perkawinan dalam Islam, para ulama fiqh berbeda pendapat tentang warisan untuk anak yang lahir karena perbuatan zina dan *li'an*. Yaitu sebagai berikut:⁵³

a. Pendapat pertama

Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i berpendapat bahwa anak tersebut dapat mewarisi dari ibu dan kerabat ibunya, dan ibu serta kerabat ibunya pun dapat mewarisi darinya, sesuai dengan kaidah waris mewarisi yang sudah diketahui. Ibu dapat mewarisi *fardh*, saudara ibu juga mewarisi *fardh*, dan sisanya dikembalikan kepada mereka yang berpendapat adanya *ar-radd*. Jumhur Ulama juga mempunyai dalil yang menguatkan pendapat mereka bahwa waris-mewarisi harus sesuai dengan ketetapan nas, dan tidak ada nas yang menyatakan bahwa ibu boleh mewarisi lebih dari sepertiga ($1/3$), demikian juga dengan saudara seibu, tidak bisa mewarisi lebih dari seperenam ($1/6$).

⁵²*Ibid*, h. 49-52.

⁵³Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h.

Contoh, seorang anak yang lahir karena perbuatan zina atau li'an wafat, meninggalkan warisan berupa tanah seluas 90 hektar dan meninggalkan ahli waris: ibu, bapak, paman, dari pihak ibu, dan bapaknya ibu.

Dalam kasus ini, warisan yang di berikan untuk ibu adalah *fardh* dan *ar-radd*, karena paman dari pihak ibu dan bapaknya ibu termasuk ke dalam kelompok *dzawil arham*, sedangkan bapak simayit tidak mendapat apa-apa karena nasabnya terputus. Namun, jika seorang anak yang lahir karena perbuatan zina atau li'an wafat meninggalkan istri, anak perempuan, dan saudara seibu, istri mendapat bagian seperdelapan (1/8), anak perempuan (1/2), sebagai *furudh* dan *ar-radd*, dan saudara seibu tidak mendapat apa-apa, karena ia tidak dapat mewarisi ketika ada bersama *dzawul-furuud* yang mewarisi.⁵⁴

b. Pendapat Kedua

Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa anak yang lahir karena perbuatan zina dan *li'an* dapat diwariskan dengan cara '*ashabah*'. '*Ashabah*-nya adalah mereka yang menjadi '*ashabah* ibunya' atau mereka yang mewarisi dari ibunya. Dalam suatu riwayat dari ibnu mas'ud, ibnu Umar pun berpendapat demikian. Pendapat ini juga dipegang oleh ulama-ulama besar dari kalangan tabi'in. Asy-Syaukani berkata ketika menjelaskan pendapat ini, ibu mendapatkan bagiannya, kemudian untuk *ashabah* ibu secara berurutan. Pembagian tersebut dilakukan, jika tidak ada orang lain selain ibu dan

⁵⁴Halid Abdul Hakim, *Op.Cit*, h. 406

kerabatnya, misalnya anak laki-laki atau istri, mereka berhak mendapatkan warisan sesuai bagiannya dalam masalah waris-mewarisi.⁵⁵

Berdasarkan pendapat mazhab ini, jika seorang anak yang lahir karena perbuatan zina atau lian wafat meninggalkan istri dan anak perempuan tidak ada lagi orang lain selain saudara seibu; istri mendapat seperdelapan ($1/8$) yang menjadi bagian tetapnya (*fardh*), anak perempuan mendapatkan separuh ($1/2$) sebagai bagian tetap (*fardh*), dan saudara seibu mendapatkan sisa sebagai *'ashabah*. Jika seorang laki-laki wafat meninggalkan seorang anak *li'an*, ibu, dan paman dari ibu, ibu mendapat sepertiga ($1/3$) dan paman dari pihak ibu mendapat ($2/3$) sebagai *'ashabah*.

Indonesia sangat mengutamakan keadilan dan kesejahteraan di depan hukum bagi setiap warga negaranya, sehingga hal ini sangat berpengaruh mengenai kewarisan anak di luar perkawinan. Mengenai bagian waris anak luar perkawinan maka hukum waris bagi yang beragama Islam diatur dalam pasal 186 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”, sedangkan bagi yang tidak beragama Islam diatur dalam KUHPerdata. Bagi penganut non-Islam yang berhak mewaris adalah sebagai berikut:

- a. Golongan I, yaitu suami atau istri yang hidup terlama dan anak-anak beserta keturunannya terus kebawah tanpa batas (Pasal 852 KUHPerdata); Jika anak luar nikah mewaris bersama-sama dengan ahli

⁵⁵*Ibid*, h. 407.

waris golongan I, maka bagiannya adalah $\frac{1}{3}$ bagian dari yang diterima jika ia dilahirkan sebagai anak yang sah (Pasal 863 BW).⁵⁶

Contoh : S meninggal dunia, ahli waris: T istrinya, V dan W anak-anak kandungnya, dan E seorang anak luar nikah yang diakui sebelum perkawinan.

Penyelesaian:

Bagian dari E adalah $\frac{1}{3} \times$ sendainya ia anak yang sah, untuk memperhitungkan maka mula-mula E dianggap anak yang sah, maka bagiannya adalah $\frac{1}{4}$.

Jadi bagian E adalah $\frac{1}{3} \times$ sendainya ia anak yang sah, jadi $\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$. Untuk T=V=W yaitu masing-masing menerima $\frac{1}{3} \times \frac{1}{12}$.

- b. Golongan II yaitu ayah/ibu atau ayah dan ibu beserta saudara-saudaranya dan keturunannya terus kebawah tanpa batas (Pasal 854 dan Pasal 855 KUHPerdata).⁵⁷
- c. Golongan III yaitu kakek/nenek atau kakek dan nenek dari garis ayah maupun garis ibu (Pasal 858 KUHPerdata);

Jika anak luar kawin mewarisi bersama-sama dengan golongan II dan III maka menurut ketentuan pasal 863 ayat 2: “jika waris hanya meninggalkan keluarga dalam garis keatas dalam saudara-saudara, maka anak luar kawin menerima $\frac{1}{2}$ dari seluruh warisan, jika ia mewarisi bersama-sama keluarga dalam garis menyimpang, maka ia menerima bagian $\frac{1}{4}$ dari seluruh warisan”.

⁵⁶Subekti, R. Tjitrosudiblo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2001), h. 222.

⁵⁷*Ibid*, h. 228.

- d. Golongan IV yaitu keluarga dalam garis lurus ke samping yang lebih jauh dari saudara, dibatasi sampai derajat keenam (Pasal 861 KUHPerdara) Jika anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris dari golongan IV, maka bagiannya adalah $\frac{1}{4}$ dari seluruh warisan (863 ayat 3 BW).⁵⁸

Contoh:

F meninggal dunia, tidak meninggalkan seorang ahli warispun dari golongan I, II, III maupun IV, yang ada hanyalah seorang anak dari luar kawin yaitu E, maka seluruh harta warisan F jatuh E.⁵⁹

Besarnya bagian warisan yang diperoleh anak luar kawin adalah tergantung dari dengan bersama-sama siapa anak luar kawin itu mewaris (atau dengan golongan ahli waris yang mana anak luar kawin itu mewaris), yaitu:

Pasal 863 :

“Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewaris *sepertiga* dari bagian yang mereka terima, andaikata mereka anak-anak yang sah; Jika pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas ataupun saudara laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka mereka mewaris *setengah dari warisan*. Jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, anak luar kawin mewaris *tiga perempat dari warisan*. ”⁶⁰

⁵⁸*Ibid*, h. 229.

⁵⁹<http://farhanhajarudin.blogspot.co.id/2015/01/book-report-hukum-waris-part4.html>, diakses pada tanggal: 05 Januari 2018, Pukul 22:30 WIB.

⁶⁰Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 65-66.

Jadi apabila pada perkawinan kedua ada anak luar kawin yang diakui sah, maka anak tersebut mendapat bagian warisan yang dengan demikian akan mengurangi bagian dari anak-anak sah dari suami/istri yang baru itu.⁶¹ Adapun orang-orang yang berhak menerima harta warisan dalam Islam antara lain:

1. Ashab al-Furudh, yaitu orang-orang yang memiliki hubungan darah dan terikat dalam pernikahan yang sah yang sudah ditentukan bagiannya sesuai dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis serta Ijma' Ulama.
2. Ashab Nasab, yaitu orang-orang yang terikat dalam hubungan darah atau pernikahan yang sah menurut agama yang tidak termasuk dalam ashab al-furudh dan tidak ada ketentuan pasti tentang bagian hartanya.
3. Dzaw al-Arham, yaitu orang-orang yang memiliki hubungan darah atau ada ikatan pernikahan dengan orang yang meninggalkan warisan. Seperti saudara laki-laki ibu, saudara laki-laki ayah, saudara perempuan ibu atau ayah, cucu laki-laki dan cucu perempuan.

Adapun rukun-rukun waris antara lain: pemberi warisan, penerima warisan, dan harta yang diwariskan. Adapun syarat-syarat terjadinya pewarisan antara lain: pemberi waris dalam keadaan meninggal baik secara alami maupun hasil keputusan orang yang berwenang (seperti hakim atau dokter), ahli waris berada dalam keadaan hidup ketika terjadi penerimaan warisan. Hal-hal yang

⁶¹*Ibid*, h. 207.

menjadi batalnya hak waris diantaranya: membunuh, murtad atau berbeda agama, hilang tanpa diketahui keberadaannya.⁶²

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, di dalam fatwa tersebut MUI memberikan ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
 - a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut
 - b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.

Dari segi kepatuhan dan perlindungan hukum terhadap anak hasil zina, MUI sependapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melindungi anak-anak hasil zina secara hukum agar tidak terlantar, teraniaya, dan terzalimi.

⁶²<https://seanochan.wordpress.com/2014/06/05/hak-waris-anak-zina/>, diakses pada tanggal: 2 Januari 2018, Pukul 05:00 WIB.

Namun, dalam aspek hubungan nasab justru MUI berpendapat anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.⁶³ Allah menegaskan dalam QS. An Nisā ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁶⁴

Menurut *fuqahâ* Syâfi'iyah juga Mâlikiyah menyatakan bahwa ibu hanya mengambil sepertiga (1/3) bagian saja, sebagaimana harta warisan anak yang

⁶³Erina Pane, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Anak Luar Nikah*, (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2014), h. 186-188.

⁶⁴Dapartemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2005), h. 201

bukan hasil zina dan sisanya diserahkan ke *bait mâl al-muslimin*. Ini adalah pendapat Zaid bin Tsabit dan para *fuqahâ* Madinah.

Adapun *fuqahâ* Hanabilah mempunyai dua riwayat, yaitu riwayat pertama, mereka menyatakan bahwa '*ashabah* anak tersebut adalah keluarga ibunya seperti *khâl* (Saudara laki-laki ibunya). Riwayat kedua, mereka justru menyatakan bahwa ibunya sendirilah yang menjadi '*ashabah* anak itu. Oleh karena itu, bila anak tersebut mempunyai saudara seibu, maka ia akan memperoleh bagian dengan cara *fardh* bukan dengan '*ashabah*. Bila anak itu perempuan, maka bagiannya setengah ($\frac{1}{2}$) dan ibu memperoleh seperenam ($\frac{1}{6}$), sementara sisanya dibagikan kembali kepada mereka berdua dengan cara *radd*.

Anak di luar nikah dan anak *mula'ana* yang tidak diakui oleh ayahnya, apabila ia wafat dapat dianggap tidak meninggalkan ayah atau kakek *shahih*. Dari itu, apabila ia tidak memiliki anak dan atau cucu dari anak laki-laki dan memiliki saudara seibu, maka bagian saudara seibu adalah seperenam ($\frac{1}{6}$) jika sendirian dan sepertiga ($\frac{1}{3}$) jika jumlah mereka dua orang atau lebih.

Contoh:

Jika ada seorang perempuan wafat dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari ibu, seorang anak laki-laki yang lahir di luar nikah, dan dua orang saudara perempuan sekandung dan harta warisan senilai 3.600 dinar. Berapakah bagian masing-masing ?

Ahli Waris	Bagian	6	3.600 Dinar
------------	--------	---	-------------

Ibu	1/6	1	600 dinar
Anak laki-laki	<i>'ashabah</i>	5	3.000 dinar
2 Saudara perempuan sekandung	<i>Mahjibah</i>	-	Terhalang oleh anak lelaki

Jawaban:⁶⁵

Menurut Empat Mazhab sepakat bahwa anak zina sama hukumnya dengan anak hasil *mula'annah* dalam kaitannya dengan masalah hak waris mewarisi antara dirinya dengan ayahnya, dan adanya hak mewarisi antara dia dengan ayahnya, dan adanya hak mewarisi antara dia dengan ibunya. Sedangkan Imamiyah menyatakan tidak ada hak waris mewarisi antara anak zina dengan ibu zinanya, sebagaimana halnya dia dan ayah zinanya. Sebab, faktor penyebab dari keduanya adalah sama, yaitu pezina.⁶⁶ Sedangkan menurut az-Zaila'iy bahwa hak pusaka mereka itu dari jurusan ibunya saja, sebab pertalian nasabnya dari jurusan ayah terputus, sedangkan pertalian nasabnya dengan ibu masih tetap. Mereka dapat mempusakai ibunya dan kerabat-kerabat dari ibunya dengan jalan fardh saja tidak dengan jalan yang lain. Demikian juga ibunya dan kerabat-kerabat ibunya dapat mewarisi harta peninggalannya dengan jalan fardh juga tidak dengan jalan lain. Menurut jumhur fuqaha' hak pusaka mereka juga dapat dengan jalan *'ushubah*, bila mereka sebagai *'ashabah*. Untuk mewarisi kerabat-kerabat ibunya bila ia masih dalam kandungan hendaknya kelahirannya itu maksimal 9 bulan sejak matinya orang yang mewariskan.

⁶⁵Muhammad Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Dar Al Kutub Al-Islamiah, 2005), h. 255-256.

⁶⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), h. 578.

Para fuqaha' kota Madinah dan sahabat Zaid bin Sabit berpendapat bahwa harta peninggalan anak zina itu dapat diwarisi sebagaimana harta peninggalan anak yang bukan hasil zina dan li'an. Yaitu ibunya dapat mewarisi 1/3 nya, sedangkan sisanya diserahkan ke Baitul-mal. Kecuali kalau ia meninggalkan saudara-saudara tunggal ibu, maka saudara-saudara tersebut memperoleh 1/3 bagian, atau kalau ibunya menjadi budak seluruh sisanya bagi tuan yang membebaskannya. Oleh karena itu jika tidak ada saudara-saudara tunggal ibu sisanya jatuh ke Baitul-mal. Imam malik, Imam Syafi'iy dan Imam Abu Hanafiyah beserta rekan-rekannya mengikuti pendapat dari para fuqaha' kota Madinah dan sahabat Zaid bin Sabit. Pendapat ulama-ulama tersebut mengikuti berdasarkan firman Allah swt dalam surat An-Nisā: 11. Tetapi jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, sedangkan yang mewarisinya hanya kedua orangtuanya, maka bagi ibunya memperoleh 1/3 peninggalan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Kewarisan Mesir berpendirian seperti pendapat Jumhur dalam menyamakan status anak zina dengan anak li'an dalam mempusakai dan mempusakakan harta peninggalan. Masing-masing dapat mempusakai harta peninggalan ibu dan kerabat-kerabat ibunya, demikian juga dapat mempusakakan harta peninggalan kepada ibu dan kerabat-kerabat ibu. Ketentuan itu dicantum dalam Pasal 47 sebagai berikut :

مَعَ عُرَاةِ الْمَدَّةِ الْمُبَيَّنَّةِ بِالْفَقْرِ إِلَّا خَيْرَةً مِنَ الْمَدَّةِ 43 يَرِثُ وَلَدًا لِنَرَى
وَوَلَدًا لِلْعَانِ مِنَ الْأُمِّ وَقَرَابَتِهَا , وَتَرِثُهُمَا الْأُمُّ وَقَرَابَتُهَا .

Artinya: *“Dengan memperhatikan ketentuan yang dijelaskan dalam alinea terakhir pasal 43, anak zina dan anak li’an mempusakai dari ibu dan kerabat ibunya, dan ibu dan kerabatnya mempusakai keduanya.”*

Dengan penunjukan alinea terakhir 43, Undang-Undang memberikan ketentuan bahwa salah seorang dari keduanya tidak dapat mewarisi kerabat ibunya yang meninggal, selama ia masih di dalam kandungan kecuali ia dilahirkan dalam keadaan hidup, maksimal 270 hari dari tanggal kematian yang mewariskan.⁶⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

⁶⁷Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Alma’rif, 1981), h. 223-225.

BAB III

PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TENTANG KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH DAN PEMBAGIAN HARTA WARISNYA

A. Gambaran Umum Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

1. Profil Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung

a. Profil Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung

Nahdlatul Ulama merupakan suatu organisasi masyarakat Islam di Indonesia yang lahir pada tanggal 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) di Kota Surabaya, Nahdlatul Ulama menganut paham Ahlussunah waljama'ah, merupakan sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrem naqli (skripturalis). Karena itu sumber hukum Islam bagi Nahdlatul Ulama tidak hanya Al-Qur'an dan Sunah tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berfikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu al-Hasan, al-Asy'ari dan Abu Mansyur Al Maturidi dalam bidang teologi/ Tauhid/ ketuhanan. Kemudian dalam bidang fiqh lebih cenderung mengikuti mazhab: Imam Syafi'i dan mengakui tiga mazhab yang lain: Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hanbali sebagaimana yang tergambar dalam lambang Nahdlatul Ulama berbintang 4 di bawah.

Nahdlatul Ulama juga memiliki Badan Otonom yaitu perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang

berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Badan Otonom dikelompokkan dalam kategori Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu, dan Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya. **Jenis Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu adalah:**

1. Muslimat Nahdlatul Ulama disingkat Muslimat NU untuk anggota perempuan Nahdlatul Ulama.
2. Fatayat Nahdlatul Ulama disingkat Fatayat NU untuk anggota perempuan muda Nahdlatul Ulama berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun.
3. Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama disingkat GP Ansor NU untuk anggota laki-laki muda Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 40 (empat puluh) tahun.
4. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat IPNU untuk pelajar dan santri laki-laki Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun.
5. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU untuk pelajar dan santri perempuan Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun.
6. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia disingkat PMII untuk mahasiswa Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 (tiga puluh) tahun.

Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya:

1. Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyyah disingkat JATMAN untuk anggota Nahdlatul Ulama pengamal tharekat yang mu'tabar.
2. Jam'iyatul Qurra Wal Huffazh disingkat JQH, untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi Qori/Qoriah dan Hafizh/Hafizhah.
3. katan Sarjana Nahdlatul Ulama disingkat ISNU adalah Badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual.
4. Serikat Buruh Muslimin Indonesia disingkat SARBUMUSI untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai buruh/karyawan/tenaga kerja.
5. Pagar Nusa untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak pada pengembangan seni bela diri.
6. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama disingkat PERGUNU untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai guru dan atau ustadz.
7. Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai nelayan.
8. Ikatan Seni Hadrah Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat ISHARINU untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak dalam pengembangan seni hadrah dan shalawat.⁶⁸

⁶⁸[Http://www.nu.or.id](http://www.nu.or.id), diakses pada tanggal: 18 Maret 2018, Pukul 04:00 WIB.

Nahdlatul Ulama juga memiliki Lajnah, Lajnah adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan program Nahdlatul Ulama yang memerlukan penanganan khusus.

1. Lajnah Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama, disingkat LTNNU, bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab/buku serta media informasi menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah.

Ketua : Fadilasari, S.Sos, MH

Sekretaris : Imam Santoso, S.Sos

2. Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama, disingkat LFNU, bertugas mengelola masalah ru'yah, hisab dan pengembangan Ilmu Falak.

Ketua : Drs. M. Said Jamhari, M.Kom.I.

Sekretaris : Drs. Masduki, M.Kom.I⁶⁹

Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung juga memiliki suatu lembaga, **lembaga adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama, khususnya yang berkaitan dengan bidang tertentu.**

Berikut pengurus lembaga-lembaga di PWNU Lampung periode 2012-2017

1. **Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama disingkat LDNU**

⁶⁹[Http://nulampung.or.id/lajnah](http://nulampung.or.id/lajnah), diakses pada tanggal: 18 Maret 2018, Pukul 04:00 WIB.

Ketua : KH. Suparman Abdul Karim, S.Ag.

Sekretaris : Imam Mahali, S.Ag., M.Kom.I.

2. Rabithah Ma'ahid al Islamiyah disingkat RMI

Ketua : Drs. KH. Basyaruddin Maisir

Sekretaris : Gus Hisyamuddin Muksin.

3. Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama disingkat LTMNU

Ketua : : Drs. Maswi

Sekretaris : Aliman Oemar

4. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama disingkat LKNU

Ketua : Erlina, S.P., MH.

Sekretaris : Muhammad Asyihin, S.Pd.

5. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia disingkat

LAKPESDAM

Ketua : Idham Manaf, S.Ag., SH., MH

Sekretaris : Azhari, AB.

6. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama disingkat LPNU

Ketua : Irwan Nasution

Sekretaris : Afrizal Ria, S.E.

7. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama disingkat

LKKNU

Ketua : Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I., M.H

Sekretaris : Mutakin, S.P

8. Lembaga Waqaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama disingkat LWPNU

Ketua : Hi. M. Reza Berawi, S.H., M.H.

Sekretaris : Hi. Achmadi Dachlan, S.H., M.H.

9. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama disingkat LBMNU

Ketua : Ust. Munawir

Sekretaris : Ust. Mahfudz

**10. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama
disingkat LAZISNU**

Ketua : Ust. Suryani M. Nur, S.Sos., MM.

Sekretaris : Drs. Bainalhuri Halim, M. Kom. I.

11. Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama disingkat LTMNU

Ketua : Drs. Maswi.

Sekretaris : Aliman Oemar.

**12. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama
disingkat LPBHNU**

Ketua : Yudi Yusnandi, S.H

Sekretaris : Abdul Kodrat, S.H

13. Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama disingkat LP Maarif

NU

Ketua : Fauzi, SE, M.Kom, Akt

Sekretaris : Dwi Rohmadi, S.Pd, M.Pd

14. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama disingkat

LPPNU

Ketua : Ir. Agus Arubusman

Sekretaris : Andi Danata AR, S.P, M.Si⁷⁰

b. Sejarah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung

Berdirinya Nahdlatul Ulama Lampung memiliki 3 alasan yang melatarbelakangi lahirnya Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926:

1. Motif Agama

Bahwa Nahdlatul Ulama lahir atas semangat menegakan dan mempertahankan agama Allah di Nusantara, meneruskan perjuangan walisongo. Terlebih Belanda-Portugal tidak hanya menjajah nusantara, akan tetapi juga menyebarkan agama Kristen yang sangat katolik dengan sangat gencarnya. Mereka membawa para misionaris kristiani ke berbagai wilayah.

2. Motif Nasionalisme

⁷⁰[Http://nulampung.or.id/pcnu](http://nulampung.or.id/pcnu), diakses pada tanggal 26 Maret 2018, Pukul 22:00 WIB.

NU lahir karena niatan kuat untuk menyatukan para ulama dan tokoh-tokoh agama dalam melawan penjajahan. Semangat nasionalisme itu pun terlihat juga dari nama Nahdlatul Ulama itu sendiri yakni Kebangkitan Para Ulama.

NU pimpinan Hadhratus Syaikh KH.Hasyim Asy'ari sangat nasionalis. Sebelum RI merdeka, para pemuda di berbagai daerah mendirikan organisasi bersifat kedaerahan, seperti Jong Cilebes, Pemuda Betawi, Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera, dan sebagainya. Tapi, kiai-kiai NU justru mendirikan organisasi pemuda bersifat nasionalis.

Pada 1924, para pemuda pesantren mendirikan Syubbanul Wathon (Pemuda Tanah Air). Organisasi pemuda itu kemudian menjadi Ansor Nahdlatul Ulama (ANO) yang salah satu tokohnya adalah pemuda gagah, Muhammad Yusuf (KH. M. Yusuf Hasyim -Pak Ud).

Selain itu dari rahim NU lahir lasykar-lasykar perjuangan fisik, di kalangan pemuda muncul lasykar-lasykar Hizbullah (Tentara Allah) dengan panglimanya KH.Zainul Arifin seorang pemuda kelahiran Barus Sumatra Utara 1909, dan di kalangan orang tua Sabilillah (Jalan menuju Allah) yang di komandoi KH.Masykur.

Sejarah mencatat, meski bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, tapi 53 hari kemudian NICA (Netherlands Indies Civil Administration) nyaris mencaplok kedaulatan RI. Pada 25 Oktober 1945, sebanyak 6.000 tentara Inggris tiba di Pelabuhan Tanjung Perak,

Surabaya. Pasukan itu dipimpin Brigadir Jenderal Mallaby, Panglima Brigade ke-49 (India). Penjahat Belanda yang sudah hengkang pun membonceng tentara sekutu itu.

Praktis, Surabaya genting. Untung, sebelum NICA datang, Soekarno sempat mengirim utusan menghadap Hadhratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari di Pesantren Tebuireng, Jombang. Melalui utusannya, Soekarno bertanya kepada Hadhratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari: "Apakah hukumnya membela Tanah Air? Bukan membela Allah, membela Islam, atau membela Alqur'an. Sekali lagi, membela Tanah Air?"

Hadhratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari yang sebelumnya sudah punya fatwa jihad kemerdekaan bertindak cepat. Dia memerintahkan KH. Wahab Hasbullah, KH. Bisri Syansuri, dan para Kiyai lain untuk mengumpulkan para Kiyai se-Jawa dan Madura. Para Kiyai dari Jawa dan Madura itu lantas rapat di Kantor PB Ansor Nahdlatul Ulama (ANO), Jalan Bubutan VI/2, Surabaya, dipimpin Kiai Wahab Hasbullah pada 22 Oktober 1945.

Pada 23 Oktober 1945, Hadhratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari atas nama Pengurus Besar NU mendeklarasikan seruan jihad fi sabilillah, yang kemudian dikenal dengan Resolusi Jihad. Ada tiga poin penting dalam Resolusi Jihad itu: *Pertama*, setiap muslim— tua, muda, dan miskin sekalipun— wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. *Kedua*, pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan layak disebut syuhada, *Ketiga*, warga Indonesia yang

memihak penjajah dianggap sebagai pemecah belah persatuan nasional, maka harus dihukum mati.

Jadi, umat Islam wajib hukumnya membela tanah air. Bahkan, haram hukumnya mundur ketika kita berhadapan dengan penjajah dalam radius 94 km (jarak ini disesuaikan dengan dibolehkannya Qashar Shalat). Di luar radius itu dianggap fardhu kifayah (kewajiban kolektif, bukan fardhu 'ain, kewajiban individu).

Fatwa jihad yang ditulis dengan huruf pegon itu kemudian digelorkan Bung Tomo lewat radio. Keruan saja, warga Surabaya dan masyarakat Jawa Timur yang keberagamaannya kuat dan mayoritas NU merasa terbakar semangatnya. Ribuan Kiyai dan santri dari berbagai daerah -seperti ditulis M.C. Ricklefs (1991), mengalir ke Surabaya.

Meletuslah peristiwa 10 November 1945 yang dikenang sebagai hari pahlawan. Para Kiyai dan pendekar tua membentuk barisan pasukan non regular Sabilillah yang dikomandani oleh KH. Maskur. Para santri dan pemuda berjuang dalam barisan pasukan Hizbullah yang dipimpin oleh H. Zainul Arifin. Sementara para Kiyai sepuh berada di barisan Mujahidin yang dipimpin oleh KH. Wahab Hasbullah. Perang tak terelakkan sampai akhirnya Brigadir Jenderal Mallaby tewas.

3. Motif Mempertahankan Fahaman Ahlussunnah wal Jama'ah

NU lahir untuk membentengi umat Islam khususnya di Indonesia agar tetap teguh pada ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah (Para

Pengikut Sunnah Nabi, Sahabat dan Ulama Salaf Pengikut Nabi-Sahabat), sehingga tidak tergiur dengan ajaran-ajaran baru (tidak dikenal zaman Rasul-Sahabat-Salafus Shaleh/ajaran ahli bid'ah).

Pembawa ajaran-ajaran bid'ah yang sesat (*bid'ah madzmumah*) menurut ulama Ahlussunnah wal Jama'ah adalah sebagai berikut:

- a) Kaum Khawarij dengan imam/pemimpinnya Abdullah bin Abdul Wahab ar-Rasabi yang muncul di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib Ra. yang berpendapat bahwa orang yang berdosa besar adalah kafir, sehingga ciri khas mereka mudah menuduh orang-orang Islam yang tidak sepaham dengan ajarannya sebagai kafir. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib Ra. pun dicap kafir karena dianggap berdosa besar mau menerima tawaran tahkim/perdamaian yang diajukan oleh pemberontak Muawiyah Ra.
- b) Kaum Syi'ah, lebih-lebih setelah munculnya sekte syi'ah Rafidhah dan Ghulat. Tokoh pendiri Syi'ah adalah Abdullah bin Saba' seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam dan menyebarkan ajaran Wishoya, bahwa kepemimpinan setelah Nabi adalah lewat wasiat Nabi Saw. Dan yang mendapatkan wasiat adalah Ali bin Abi Thalib Ra. Dan Abu Bakar, Umar dan Utsman termasuk perampok jabatan.
- c) Aliran Mu'tazilah yang didirikan oleh seorang tabi'in yang bernama Wasil bin Atho', ciri ajaran ini adalah menafsirkan al-

Qur'an dan kebenaran agama ukurannya adalah akal manusia, bahkan mereka berpendapat demi sebuah keadilan Allah harus menciptakan al-manzilah baina al-manzilataini, yakni satu tempat di antara surga dan neraka sebagai tempat bagi orang-orang gila.

d) Faham Qodariyyah yang pendirinya adalah Ma'bad al-Juhaini dan Ghailan ad-Dimasyqi keduanya murid Wasil bin Atho' dan keduanya dijatuhi hukuman mati oleh Gubernur Irak dan Damaskus karena menyebarkan ajaran sesat (bid'ah), ciri ajarannya adalah manusia berkuasa penuh atas dunia ini, karena tugas Allah telah selesai dengan diciptakannya dunia, dan bertugas lagi nanti ketika kiamat datang.

e) Aliran Mujassimah atau kaum Hasyawiyyah ciri aliran ini menjasmanikan Allah (menyerupakan Allah dengan makhluk) yang diawali dengan menafsirkan al-Qur'an secara lafdziy dan tidak menerima ta'wil, sehingga mengartikan yadullah adalah Tangan Allah. (Lihat Ibnu Hajar al-'Asqolani dalam Fath al-Baari Juz XX hal. 494). Bahkan mereka sanggup mengatakan bahwa pada suatu ketika, kedua mata Allah kesedihan, lalu para malaikat datang menemuiNya dan Dia (Allah) menangisi (kesedihan) berakibat banjir Nabi Nuh As. sehingga mataNya menjadi merah, dan 'Arsy meratap hiba seperti suara pelana baru dan bahwa Dia melampaui 'Arsy

dalam keadaan melebihi empat jari di segenap sudut. (Lihat asy-Syahrastani dalam al-Milal wa an-Nihal, hal. 141).

- f) Ajaran-ajaran Para Pembaharu Agama Islam (Mujaddid) yang dimulai dari Ibnu Taimiyyah (661-728 H / 1263-1328 M atau abad ke 7 – 8 H / 13 – 14 M yakni 700 tahun setelah Nabi Saw. wafat atau 500 tahun dari masa Imam asy-Syafi'i). Beliau mengaku penganut madzhab Hanbali, tapi anehnya beliau justru menjadi orang pertama yang menentang sistem madzhab. Pemikirannya lalu dilanjutkan muridnya Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah. Aliran ini kemudian dikenal dengan nama aliran salafi-salafiyah yang mengaku memurnikan ajaran kembali ke Alquran dan Hadits, tetapi di sisi lain mereka justru mengingkari banyak hadits-hadits Shahih (inkarus sunnah). Mereka ingin memberantas bid'ah tetapi pemahaman tentang bid'ahnya melenceng dari makna bid'ah yang dikehendaki Rasulullah Saw., yang dipahami oleh para sahabat dan para ulama salaf Ahlussunnah wal Jama'ah.

Mereka juga membangkitkan kembali penafsiran Alquran-Sunnah secara lafdziy. Golongan Salafi ini percaya bahwa Alquran dan Sunnah hanya bisa diartikan secara tekstual (apa adanya teks) atau literal dan tidak ada arti majazi atau kiasan di dalamnya. Pada kenyataannya terdapat ayat Alquran yang mempunyai arti harfiah dan ada juga yang mempunyai arti majazi, yang mana kata-kata Allah Swt. harus diartikan sesuai dengannya. Jika kita tidak dapat

membedakan di antara keduanya maka kita akan menjumpai beberapa kontradiksi yang timbul di dalam Al-Qur'an. Maka dari itu sangatlah penting untuk memahami masalah tersebut.

Dengan adanya keyakinan bahwa seluruh kandungan Alquran dan Sunnah hanya memiliki makna secara tekstual atau literal dan jauh dari makna majazi atau kiasan ini, maka akibatnya mereka memberi sifat secara fisik kepada Allah Swt. (umpama Dia Swt. mempunyai tangan, kaki, mata dan lain-lain seperti makhlukNya). Mereka juga mengatakan terdapat kursi yang sangat besar ('Arsy) dimana Allah SWT duduk (sehingga Dia membutuhkan ruangan atau tempat untuk duduk) di atasnya.

Terdapat banyak masalah lainnya yang diartikan secara tekstual. Hal ini telah membuat banyak fitnah di antara umat Islam, dan inilah yang paling pokok dari mereka yang membuat berbeda dari madzhab yang lain. Salafisme ini hanya berjalan atas tiga komposisi yaitu; Syirik, Bid'ah dan Haram. (Penjelasan rincinya akan dibahas kemudian).

Munculnya Muhammad bin Abdul Wahab di abad ke 12 H / 18 M, seorang pembaharu agama (mujaddid) yang lahir di Ayibah lembah Najed (1115-1201 H/1703-1787 M) yang mengaku sebagai penerus ajaran Salafi Ibnu Taimiyyah dan kemudian mendirikan madzhab Wahabi-Wahabiyyah. Ia pun mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jama'ah karena meneruskan pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal yang diterjemahkan oleh Ibnu Taimiyyah, tapi sebagaimana pendahulunya, Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikutnya pun layaknya

kaum Khawarij yang mudah mengkafirkan para ulama yang tidak sejalan dengan dia, bahkan sesama madzhab Hanbali pun ia mengkafirkanya.

Di sini, kita akan mengemukakan beberapa pengkafiran Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap beberapa tokoh ulama Ahlussunnah yang tidak sejalan dengan pemikiran sektenya:

- Dalam sebuah surat yang dilayangkan kepada Syeikh Sulaiman bin Sahim –seorang tokoh madzhab Hanbali pada zamannya Ia (Muhamad Abdul Wahhab) menuliskan: “Aku mengingatkan kepadamu bahwa engkau bersama ayahmu telah dengan jelas melakukan perbuatan kekafiran, syirik dan kemunafikan! Engkau bersama ayahmu siang dan malam sekuat tenaga telah berbuat permusuhan terhadap agama ini! Engkau adalah seorang penentang yang sesat di atas keilmuan. Dengan sengaja melakukan kekafiran terhadap Islam. Kitab kalian itu menjadi bukti kekafiran kalian!” (Lihat dalam ad-Durar as-Saniyah jilid 10 hal. 31).
- Dalam sebuah surat yang dilayangkan untuk Ibnu Isa –yang telah melakukan argumentasi terhadap pemikirannya – Muhammad Abdul Wahhab menvonis sesat para pakar fikih (fuqoha) secara keseluruhan. Ia (Muhamad Abdul Wahhab) menyatakan: (Firman Allah); “Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah”.

Rasul dan para imam setelahnya telah mengartikannya sebagai ‘Fikih’ dan itu yang telah dinyatakan oleh Allah sebagai perbuatan syirik. Mempelajari hal tadi masuk kategori menuhankan hal-hal lain selain Allah. Aku tidak melihat terdapat perbedaan pendapat para ahli tafsir dalam masalah ini.” (Lihat dalam ad-Durar as-Saniyah jilid 2 hal. 59).

- Berkaitan dengan Imam Fakhrur Razi –pengarang kitab Tafsir al-Kabir, yang bermadzhab Syafi’i Asy’ary– ia (Muhamad Abdul Wahhab) mengatakan: “Sesungguhnya Razi tersebut telah mengarang sebuah kitab yang membenarkan para penyembah bintang.” (Lihat dalam ad-Durar as-Saniyah jilid 10 hal. 355). Betapa kedangkalan ilmu Muhamad bin Abdul Wahhab terhadap karya Imam Fakhrur Razi. Padahal dalam karya tersebut, Imam Fakhrur Razi menjelaskan tentang beberapa hal yang menjelaskan fungsi gugusan bintang dalam kaitannya dengan fenomena yang berada di bumi, termasuk berkaitan dengan bidang pertanian. Namun Muhammad bin Abdul Wahhab dengan keterbatasan ilmu terhadap ilmu perbintangan telah menvonisnya dengan julukan yang tidak layak, tanpa didasari ilmu yang cukup.

Dari berbagai pernyataan di atas maka jangan kita heran jika Muhammad bin Abdul Wahhab pun mengkafirkan serta diikuti oleh para pengikutnya (Wahhabi) para pakar teologi (mutakallimin) Ahlusunnah secara keseluruhan

(Lihat dalam ad-Durar as-Saniyah jilid 1 hal. 53), bahkan ia (Muhamad Abdul Wahhab) mengaku-ngaku bahwa kesesatan para pakar teologi tadi merupakan konsensus (ijma') para ulama dengan mencatut nama para ulama seperti adz-Dzahabi, Imam Daruquthni dan al-Baihaqi.

Tokoh Pembaharu Agama (mujaddid) lain penerus faham salafi Ibnu Taimiyyah adalah muncul pada abad ke 19 di Afghanistan yang bernama Jamaluddin al-Afghani (1838-1898). Ajarannya diteruskan oleh muridnya dari Mesir di abad ke 19 – 20 M yang bernama Muhammad Abduh (1849-1905). Pemikiran Muhammad Abduh menyebar ke berbagai penjuru dunia lewat tulisannya yang dimuat dalam majalah al-Manar. Setelah beliau wafat pada tahun 1905, majalah al-Manar diteruskan oleh muridnya yang bernama Muhammad Rasyid Ridla (1865-1935). Kumpulan tulisan Muhammad Abduh dan M. Rasyid Ridla ini kemudian dibukukan menjadi Tafsir al-Manar.

Dalam perkembangannya aliran Salafi-Wahabi pun terpecah dalam banyak faksi (kelompok) dengan karakteristiknya masing-masing, tergantung pada imam mana yang diikutinya. Tokoh ulama Wahabi yang menjadi rujukan dan panutan saat ini adalah Muhammad Nashiruddin al-Albani seorang dosen Ilmu Hadits di Universitas Islam Madinah yang lahir pada tahun 1915 dan wafat 1 Oktober 1989. Ia dipuja-puja kaum Wahabi-Salafi bahkan dianggap lebih alim dari Imam Bukhori, karena ia men-Takhrij/mengomentari beberapa haditsnya Imam Bukhori (194 – 256 H).

Ajaran Salafi-Wahabi ini masuk ke Indonesia mulanya: *pertama*, Dibawa oleh seorang tokoh pembaharu agama (mujaddid) asal Yogyakarta yang bernama Darwis yang aktif dan rutin mengikuti pemikiran Muhammad Abduh-M. Rasyid Ridla lewat majalah al-Manar dan ajaran Wahabi. Ia kemudian dikenal dengan nama KH. Ahmad Dahlan yang pada 18 Nopember 1912 mendirikan organisasi keagamaan Muhammadiyah. Walaupun kenyataannya dalam amaliyah sehari-hari selama hidupnya KH. Ahmad Dahlan lebih dekat kepada madzhab Syafi'i. Namun sepeninggal beliau terjadi modernisasi total dari para penerusnya.

Kedua, Syaikh Akhmad Soorkati (1872-1943) seorang tokoh pembaharu (mujaddid) asal Sudan yang kalah bersaing dalam Jami'at al-Khair di negaranya, kemudian Hijrah ke Indonesia dan tahun 1914 di Betawi mendirikan organisasi al-Irsyad.

Ketiga, Di Bandung pun muncul Mujaddid yang bernama A. Hasan yang juga dikenal sebagai Hasan Bandung atau Hasan Bangil yang tahun 1927 meneruskan organisasi PERSIS (Persatuan Islam) yang didirikan pada 1923 oleh KH. Zam Zam Palembang.

Keempat, HOS. Cokroaminoto dengan PSII (Persatuan Syarikat Islam Indonesia).

Apa yang Menyebabkan Aliran "Islam Baru" Dapat Menyebarkan dengan Cepat?

Muhammad bin Abdul Wahab pernah menguji coba ajarannya kepada penduduk

Bashrah, tetapi karena mereka adalah penganut fanatik ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah, maka usahanya bagaikan menabrak batu karang. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab menetap di Dir'iyah dan Pangeran Muhammad ibn Saud (dari Dir'iyah Najed) setuju untuk saling dukung-mendukung dengan Wahhabi.

Keluarga/Klan Saud dan pasukan/lasykar Wahhabi berkembang menjadi dominan di semenanjung Arabia, pertama menundukkan Najed, lalu memperluas kekuasaan mereka ke pantai timur dari Kuwait sampai Oman. Orang Saudi juga membawa tanah tinggi 'Asir di bawah kedaulatan mereka dan pasukan Wahhabi mereka mengadakan serangan di Irak dan Suriah, dan menguasai kota suci Shi'ah, Karbala tahun 1801.

Pada tahun 1802, pasukan Saudi-lasykar Wahhabi merebut kota Hijaz (Jeddah, Makkah, Madinah dan sekitarnya) di bawah kekuasaan mereka. Hal ini menyebabkan kemarahan Daulah Utsmaniyah Turki, yang telah menguasai kota suci sejak tahun 1517, dan membuat Daulah Utsmaniyah bergerak. Tugas untuk menghancurkan Wahhabi diberikan oleh Daulah Utsmaniyah Turki kepada raja muda kuat Mesir, Muhammad Ali Pasha.

Muhammad Ali mengirim pasukannya ke Hijaz melalui laut dan merebutnya kembali. Anakanya, Ibrahim Pasha, lalu memimpin pasukan Utsmaniyah ke jantung Najed, merebut kota ke kota. Akhirnya, Ibrahim mencapai ibukota Saudi, Dir'iyah dan menyerangnya untuk beberapa bulan sampai kota itu menyerah pada musim dingin tahun 1818.

Ibrahim lalu membawa banyak anggota klan Al Saud dan Ibn Abdil Wahhab ke Mesir dan Ibukota Utsmaniyah, Istanbul Turki, dan memerintahkan penghancuran Diriyah, yang reruntuhannya kini tidak pernah disentuh kembali. Pemimpin Saudi terakhir, Abdullah bin Saud dieksekusi di Ibukota Utsmaniyah, dan kepalanya dilempar ke air Bosphorus. Sejarah kerajaan Saudi Pertama berakhir, namun, Wahhabi dan klan Al Saud hidup terus dan mendirikan kerajaan Saudi Kedua yang bertahan sampai tahun 1891.

Perselingkuhan agama, ambisi kekuasaan penting asing dimulai dari wilayah Najed. Ketika lasykar Wahhabi klan Al Saud yang dipimpin Abdul Aziz Ibnu Sa'ud menyusun kekuatan kembali disertai dukungan persenjataan mesin dari sekutu lamanya, Inggris (antek Amerika). Maka awal tahun 1900-an mereka menyerang kembali kota Hijaz yang saat itu dipimpin Raja Syarif Husain. Ketika itu Hijaz hanya dibantu oleh Daulah Utsmaniyyah Turki yang sudah mulai lemah, dan akhirnya pada tahun 1924 ketika kekuasaannya sudah mengecil Raja Syarif Husain mengasingkan diri ke kepulauan Cyprus dan kekuasaannya diserahkan pada putranya yang bernama raja Syarif Ali.

Raja Syarif Ali membuat kota-kota pertahanan baru, tapi lasykar Wahhabi-klan Ibnu Sa'ud dengan persenjataan canggih berhasil mengepung semua kota, hingga yang tersisa hanya pertahanan di pelabuhan Jeddah. Pada ahir 1925 ketika lasykar Wahhabi-klan Ibnu Sa'ud berhasil menguasai pelabuhan Jeddah, maka Raja Syarif Ali menyerah pada pemberontak.

Dari tahun 1925 inilah Hijaz dengan dua kota suci Makkah dan Madinah dikuasai oleh keluarga Sa'ud dan Wahhabi. Dan akhirnya tepat tanggal 23 September tahun 1932, Hijaz berubah nama menjadi al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Sa'udiyyah, Kerajaan Arab Sau'di, yang dinisbatkan kepada nama leluhurnya yakni Al Sa'ud, dengan Ibukotanya Riyadh. Dan tahun 1943 muncullah ARAMCO (Arabian-American Company) yang mengeksplorasi minyak Arab Saudi. Dari sejarah itulah, mengapa sampai saat ini Arab Saudi selalu tidak bisa bersuara selain seperti suara Amerika, sekalipun harus berbeda dengan negara-negara Islam lainnya.

Jatuhnya Hijaz ke tangan pemberontak pada 1925 tidak hanya berakibat perubahan pemeritahan, tapi juga merombak total praktek-praktek keagamaan di Hijaz dari yang semula Ahlussunnah wal Jama'ah menjadi faham Wahhabi. Seperti larangan bermadzhab, larangan ziarah ke makam-makam pahlwan Islam, larangan merokok, larangan berhaji dengan cara madzhab. Bahkan makam Rasulullah Saw., sahabat dan tempat-tempat bersejarah pun berencana akan digusur karena dianggap sebagai biang/tempatnya kemusyrikan.

Ketika aliran Salafi-Wahhabi berkembang di Dir'iyyah maupun Najed itu belumlah membuat risau umat Islam dunia. Tetapi ketika mereka menguasai pusat Islam yakni dua kota suci di Hijaz, maka hal ini menimbulkan dampak yang luar biasa, termasuk dalam persebarannya ke seluruh dunia. Melihat perubahan ajaran yang terjadi di Hijaz, maka hampir semua umat Islam Ahlussunnah wal Jama'ah

di seluruh dunia memprotes rencana pemerintahan baru di Hijaz yang ingin memberlakukan asas tunggal, yakni madzhab Wahhabi.

Protes luar biasa pun muncul di Indonesia, ketika bulan Januari 1926 ulama-ulama Ahlussunnah wal Jama'ah di Indonesia berkumpul di Surabaya untuk membahas perubahan ajaran di dua kota suci. Dari pertemuan tersebut lahirlah panitia Komite Hijaz yang diberi mandat untuk menghadap raja Ibnu Sa'ud guna menyampaikan masukan dari ulama-ulama Ahlussunnah wal Jama'ah di Indonesia. Akan tetapi karena belum ada organisasi induk yang menaungi delegasi Komite Hijaz, maka pada tanggal 31 Januari 1926, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jama'ah Indonesia kembali berkumpul dan membentuk organisasi Induk yang diberi nama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Para Ulama) dengan Rois Akbar Hadhratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari. Susunan delegasi Komite Hijaz NU untuk menghadap raja Ibnu Sa'ud adalah sebagai berikut:

Penasehat : KH. Abdul Wahab Hasbullah, KH. Masyhuri Lasem, KH. Kholil Lasem

Ketua : KH. Hasan Gipo,

Wakil Ketua : H. Shaleh Syamil

Sekretaris : Muhammad Shadiq

Pembantu : KH. Abdul Halim

Materi pokok yang hendak disampaikan langsung ke hadapan raja Ibnu Sa'ud adalah:

- 1) Meminta kepada raja Ibnu Sa'ud untuk memberlakukan kebebasan bermadzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.
- 2) Meminta tetap diramaikannya tempat bersejarah karena tempat tersebut telah diwakafkan untuk masjid.
- 3) Mohon agar disebarluaskan ke seluruh dunia setiap tahun sebelum jatuhnya musim haji, baik ongkos haji, perjalanan keliling Makkah maupun tentang Syekh.
- 4) Mohon hendaknya semua hukum yang berlaku di negeri Hijaz, ditulis sebagai undang-undang supaya tidak terjadi pelanggaran hanya karena belum ditulisnya undang-undang tersebut.
- 5) Jam'iyah NU mohon jawaban tertulis yang menjelaskan bahwa utusan sudah menghadap raja Ibnu Sa'ud dan sudah pula menyampaikan usul-usul NU tersebut.⁷¹

c. Visi Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung:

- 1) Menjadi Jam'iyah diniyah Islamiyah ijtima'iyah yang memperjuangkan tegaknya ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah an nahdliyyah

⁷¹<http://nulampung.or.id/blog/nu-dan-sejarah-berdirinya.html>, diakses pada tanggal 26 Februari 2018, Pukul 05:00 WIB.

- 2) Mewujudkan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, kesejahteraan, keadilan, dan kemandirian khususnya warga Nahdlatul Ulama serta terciptanya rahmat bagi semesta dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila.

d. Misi Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung:

- 1) Mengembangkan gerakan penyebaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah'ah an Nadliyyah untuk mewujudkan ummat yang memiliki karakter Tawassuth (moderat), Tawazun (seimbang), I'tidal (tegak lurus) dan Tasamuh (toleran)
- 2) Mengembangkan beragam khadimah bagi jama'ah Nahdlatul Ulama guna meningkatkan kualitas SDM Nahdlatul Ulama dan kesejahteraannya serta untuk kemandirian jam'iyah Nahdlatul Ulama.
- 3) Mempengaruhi para pemutus kebijakan maupun undang-undang agar produk kebijakan maupun UU yang dihasilkan berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan rasa keadilan.⁷²

e. Struktur Organisasi Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung

Kepengurusan Organisasi Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung:

- 1) Tanfidziyah

Ketua : KH. RM. Soleh Bajuri, SHI, MHI

⁷²<http://nahdlatululama.id/organisasi/visi-misi/#>, diakses pada tanggal 26 Februari 2018, Pukul 04:30 WIB

Wakil Ketua : Hi. Heri Iswahyudi, M.Ag

Wakil Ketua : H. Okta Rijaya M, SHI

Wakil Ketua : Prof. Dr. Hi. Syamsuri Aly

Wakil Ketua : Drs. Lazuardi Alwi

Wakil Ketua : Chairullah AY

Wakil Ketua : H. Noverisman Subing, SH, MM

Wakil Ketua : Prof. Dr. Hi. Aom Karomani, M.Si

Wakil Ketua : Drs. KH. Agus Saiful Islam

Wakil Ketua : Sholihin S.Pd.I, MH

Wakil Ketua : Ir. Teguh Wibowo

Wakil Ketua : Juwendra Asdiansyah

Wakil Ketua : Dr. Hi. Muhammad Khadafi, SH, MH

Sekretaris : Drs. Aranto Munawar

Wakil Sekretaris : Khaidir Bujung, S.Ag

Wakil Sekretaris : Muhiddin Penata Gumilang, SE

Wakil Sekretaris : Ichawan Adji Wibowo, S.Pt, MM

Wakil Sekretaris : Dr. Andi Ali Akbar

Wakil Sekretaris : Ir. H. Muhammad Irfandi

Wakil Sekretaris : Ir. H. Midi Ismanto, MH

Wakil Sekretaris : H. Solihin, S.Ag, M.Ag

Wakil Sekretaris : Maulana Muhlis, SIP, MIP

Wakil Sekretaris : Indriyani, S.Pd

Wakil Sekretaris : Mislamuddin, S.Pd

Wakil Sekretaris : Ir. Agus Arubusman

Bendahara : Muhammad Tio Aliyansyah, SH, MH

Wakil Bendahara : Arifin Gunawan, SE

Wakil Bendahara : Drs. M. Effendi⁷³

2) A'wan

Prof. Dr. M. Nasor

Dr. Wan Jamaluddin, MA

Dr. KH. Afif Ansori

Dr. Alamsyah

Dr. Asrori

Drs. Hi. Suyoto, M.Ag

KH. Khoirul Anam

Dr. Alhuda Muhajirin

KH. Munazir

KH. Umar Ansori Husnan

KH. Haris Al-Hamdani

Hi. Ichwan Fikri, Lc, MA.

KH. Rois RS

KH. A. Wahid Zamas

KH. Munir

Ir. Hi, Nur Zaini

KH. Imam Zudhi Adnan

⁷³Lihat di Lampiran Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung

Drs. A. Basyir Al-Huda

Ki. Khoiri Abu Bakar, SH

KH. Nur Mahfudz

3) Katib

Wakil Katib : KH. Ihya Ulumuddin

Wakil Katib : KH. Muhammad Mabror, M.Si

Wakil Katib : KH. Basyaruddin Maisir

Wakil Katib : Habib Ahmad Husen Al Habsi

Wakil Katib : Ki. Musyafa' Ahmad

Wakil Katib : Ki Cecep Badruddin Hasan Basri

Wakil Katib : KH. Syaikhul Ulum Syuhada

Wakil Katib : Dr. Ahmad Farich

4) Syuriah

Rais : KH. Muhsin Abdillah

Wakil Rais : Drs. KH. Ngiliman Marzuki, M.Pd.I

Wakil Rais : Dr. KH. Khairuddin Tahmid, MH

Wakil Rais : Drs. KH. Bahruddin, MA

Wakil Rais : KH. A. Syukron

Wakil Rais : KH. Miftahuddin Al-Bustomi

Wakil Rais : KH. Dardini Ahmad

Wakil Rais : KH. Imam Muhayiddin

Wakil Rais : Drs. KH. Heriyuddin Yusuf



Wakil Rais : H. Syukri Hadi

5) Mustasyar

KH. Ahmad Sodik

KH. Arief Mahya

Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M.Ag

Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Haryanto

Drs. Hi. Musa Zainuddin

KH. Ma'ruf Adnan

Fajrun Najah Ahmad

Dr. H. Sapta Nirwandar, SE

Ir. H. Tony Eka Chandra

Fauzi Hasan, SE, MM

KH. Syamsuddin Tohir

Drs. H. Munzir AS

KH. Hafiduddin Hanief

KH. M. Ihwan Asron, MA

H. Ismail sanjaya

H. Malhani Mannan, BBA

H. Muhtar Lutfi, SH., MH



2. Profil Muhammadiyah Provinsi Lampung

a. Profil Muhammadiyah Provinsi Lampung

Nama persyarikatan ini bernama Muhammadiyah, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, Da'awah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumberkan

Al-qur'an dan As-Sunnah. Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi yang berasaskan Islam dan untuk mencaapai tujuan diwujudkan usaha dalam segala bidang, dalam bentuk amal usaha, program dan kegiatan yang diatur ART.Keanggotaan dalam organisasi Muhammadiyah terdapat 3 bentuk anggota yaitu, anggota biasa (WNI, Islam), anggota luar biasa (WNA, Islam), dan anggota kehormatan (Indvidu Islam, Berjasa thd Muh). Di Muhammadiyah Provinsi Lampung memiliki 5 susunan organisasi yaitu:

1. Pusat adalah Kesatuan Wilayah dalam Negara.
2. Wilayah adalah Kesatuan Daerah dalam satu Provinsi.
3. Daerah adalah Kesatuan Cabang dalam satu Kota atau Kabupaten.
4. Cabang adalah Kesatuan Ranting dalam satu tempat.
5. Ranting adalah Kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan.

Organisasi Islam Muhammadiyah memiliki unsur pembantu dalam pimpinan ada 2 yaitu Majelis (tugas pokok) dan Lembaga (tugas pendukung). Muhammadiyah Provinsi Lampung juga memiliki 7 organisasi otonom (OTOM) yaitu:

1. 'Aisiyah.
2. Nasiatul Aisiyah (NA).
3. Pemuda Muhammadiyah.
4. Hisbulwathan.
5. Tapaksuci Putra Muhammadiyah.
6. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
7. Ikatan Pelajar Muhammadiyah.

Organisasi Muhammadiyah Provinsi Lampung memiliki 10 permusyawatan diantaranya yaitu:

1. Mukatamar.
2. Mukatamar Luar Biasa.
3. Tanwir.
4. Musywil.
5. Musyda.
6. Musycab.
7. Musyran.
8. Musypim.
9. Rapim.
10. Raker.

Adapun sumber keuangan dan kekayaan organisasi Muhammadiyah

Provinsi Lampung yaitu, uang pangkal, iuran, bantuan, hasil hak milik muhammadiyah, ZIS, wakaf, wasiat, hibah, usaha-usaha perekonomian muhammadiyah, dan sumber-sumber lainnya. Organisasi Muhammadiyah

Provinsi Lampung juga memiliki unsurpembantu pimpinan yaitu:

1. Majelis tarjih dan pemikiran Islam.
2. Majelis tabligh dan da'wah khusus.
3. Pendidikan kader.
4. Pendidikan dasar dan menengah.
5. Pembina kesehatan umum.

6. Pelayanan social dan penanggulangan bencana.
7. Ekonomi dan kewirausahaan.
8. Wakaf dan kehartabendaan.
9. Pemberdayaan masyarakat
10. Hukum dan HAM
11. Lingkungan hidup
12. Perpustakaan dan publikasi.

Arah program gerakan organisasi Muhammadiyah adalah sebagai transformasi sistem gerakan dan jaringan (maju, modern, dan profesional) dan sebagai transformasi sistem gerakan dan AUM serta sebagai transformasi sistem peran (nasional global). Muhammadiyah Provinsi Lampung juga memiliki 3 bidang amal usaha yaitu bidang pendidikan, bidang ekonomi dan bidang kesehatan. Organisasi Muhammadiyah Provinsi Lampung juga memiliki sebuah lembaga-lembaga diantaranya yaitu:

1. Pengembangan cabang dan ranting.
2. Pembinaan keuangan.
3. Amal infaq dan sodaqoh.
4. Hikmah dan kebijakan public.
5. Seni, budaya dan olahraga.
6. Pengembangan pesantren.

Daerah organisasi Muhammadiyah Provinsi Lampung memiliki 15 PDM, Cabang dan ranting, dan jumlah sekolah yang dimiliki ada PAUD, TK, SD, SLP,

SLA, PT :8 PT, Pondok Pesantren. Jumlah AUM Ekonomi ada 60 BTm, dan jumlah Institusi kesehatan yang dimiliki oleh organisasi Muhammadiyah Provinsi Lampung ada 2 Rumah sakit dan 3 Klinik.⁷⁴

a. Sejarah Muhammadiyah Provinsi Lampung

Berikut ini adalah sejarah dan perkembangan Muhammadiyah Provinsi Lampung:

- Periode I (1931-1938): Ketua Zaenal Abidin Jambek, dibantu Abdulhadi, dan R.Z. Fanani (SK,PP No. 60/tahun 1931).Dan ditetapkan 2 cabang:
 1. Cabang Menggala dengan SK 357 tgl 13 oktober 1932 dan Teluk Betung
 2. Cabang Teluk Betung dengan SK No. 511 tgl 10 oktober 1934, kegiatan utama: Dakwah pemahaman tentang islam dan Muhammadiyah dan mendirikan sekolah.
- Periode II (1938- Zaman Jepang): ketua R.Z. Fanani, dibantu Nuryunus dan Abdulhadi. Kegiatan banyak dibekukan Jepang. Yang eksis Sekolah Rakyat dan Mualimin Muhammadiyah di Negara Batin.
- Periode III (1945-1947): Ketua Nuryunus, dibantu Masdulhak dan Ragimin. Semua kegiatan yang dibekukan Jepang difungsikan lagi.

⁷⁴Lihat di Lampiran Profil Muhammadiyah Provinsi Lampung

- Periode IV (1947-1950): Ketua Masdulhak, dan Rasyidi Syarif sebagai sekretaris. Penertiban dan penataan kembali kegiatan-kegiatan yang fakum dan yang dibekukan.
- Periode V (1950-1952): Ketua H. Sulaiman Hetami dan sekretaris Bahiram Bakar, Mendirikan sekolah tablegh di Metro (LT), Sekolah guru di kota bumi (LU) Ortom NA dan pemuda, Biro Konsultasi rumah bersalin.
- Periode VI (1952-1956): idem, dengan peningkatan usaha yang telah dirintis.
- Periode VII (1956-1959): Ketua Baheram Bakar, sekretaris Ragimin. SK No 5/ tanggal 8 Desember 1956. Kegiatan jamboree HW 20-23 juni 1957, membentuk cabang Tanjung Karang. Keluar dari Masyumi, dan kembali ke khitah tidak berpolitik praktis.
- Periode VIII (1959-1962): Ketua Baheram Bakar, sekretaris Ragimin (SK PP. No. 24/B tanggal 17 Agustus 1960). Kegiatan majelis tabligh mendirikan gedung dakwah di Durian Payung, Sekolah Muallimin di jalan. Raden Saleh, Rumah Sakit bersalin Tanjung Karang, Panti asuhan di Metro. Mendirikan sekolah Tinggi Tabligh (di Cabang Pringsewu 1 mei 1962, Kota Agung 1 November 1962 dan Kasui 21 November 1961).
- Periode IX (1962-1965): Ketua Baheram Bakar, sekretaris Rasyidi Syarif dan Bokhary Natsir. Mendirikan cabang-cabang: pekalongan, Trimurjo, hadimulyo, Kedaloman dan Wagomulyo,

tanggal 1 mei 1963, Purbolinggo 3 April 1963, Sukadana 22 April 1965, Tanjung Raja 27 Juli 1964, Padang Manis 23 Oktober 1963, Gedung Tataan 5 September 1963, Gading Rejo 22 Februari 1963, dan Ambarawa 23 Desember 1965.

- Periode X (1965-1968): Ketua Baheram Bakar, sekretaris Hilman Hadikusuma, SK No 33/PMD, Juli 1966. Jika ada anggota aktif di partai yang tidak asas Islam maka dikeluarkan dari anggota Muhammadiyah. Dengan KOKAM menumpas PKI, dengan cabang: Kalirejo, wonosari, sekampung, Bantul, Seputih Raman dst hampir semua cabang punya KOKAM.
- Periode XI (1971-1974): Ketua Muhi, sekretaris Rasyidi Syarif: Berdiri Perguruan Tinggi Muh Metro; Cabang Sumpuk Banding 119 April 1973, Labuhan Maringgai 24 Maret 1974.
- Periode XIII (1974-1977): Ketua Muhi, sekretaris Rasyidi Syarif. PTM Bandar Lampung, Lampung Utara 14 Cabang 70 ranting, Lampung Tengah 22 Cabang dan 120 ranting, Lampung Selatan 30 Cabang dan 150 ranting, Kodya 3 cabang 15 ranting.
- Periode XIV: Ketua Mulyan Zein, sekretaris Ahmad Zaki.
- Periode XV (Ketua Masdulhak, sekretaris Damanhuri Fatah.⁷⁵

c. Visi Muhammadiyah Provinsi Lampung

Visi Muhammadiyah Provinsi Lampung adalah terwujudnya Masyarakat Islam yang Sebenar-benarnya.

⁷⁵Lihat di Lampiran Profil Muhammadiyah Provinsi Lampung

d. Misi Muhammadiyah Provinsi Lampung

- 1) Menegakan Tauhid yang murni berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.
- 2) Menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahihah dan maqbullah.
- 3) Mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi keluarga dan Masyarakat.

e. Struktur Organisasi Muhammadiyah Provinsi Lampung

Kepengurusan Organisasi Muhammadiyah Provinsi Lampung:

Ketua : Prof. Dr. H. Marzuki Noor, M.S.

Wakil Ketua : Dr. H. Syarif Ma hya.

Wakil Ketua : Drs. Fauzi Fatah M.M

Wakil Ketua : Mansyur Hidayat S.Ag.,M.Ag

Wakil Ketua : Syamsul Hilal, S.Ag.,M.Ag

Wakil Ketua : Prof. Dr. Warshito, M.Si.

Wakil Ketua : Prof. Dr. Jurnalís Etek, M.Ag.

Sekretaris : Dr. H. Sudarman, M.Ag.

Wakil Sekretaris : Drs Ahmad Syukri, MM

Bendahara : Ir. H. Muzakir Nur.

Wakil Bendahara : Drs Baijuri Rasyid, M.Ag.

Penasehat : H. Nufaif Chaniago dan Drs. H. Chusni Syarnubi.⁷⁶

B. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah dan Pembagian Harta Warisnya

Anak adalah suatu amanah sekaligus karunia Allah SWT yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orangtua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibenarkan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.⁷⁷ Nasab seorang anak yang lahir di luar nikah dinisbatkan kepada ibunya, dan mendapatkan warisan dari pihak ibunya⁷⁸.

Menurut bapak KH. RM. Soleh Bajuri selaku ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung bahwasannya anak yang lahir di luar nikah tidak mendapatkan harta warisan dari ayah biologisnya karena nasabnya terputus sesuai dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, karena tokoh Nahdlatul Ulama

⁷⁶Lihat di Lampiran Profil Muhammadiyah Provinsi Lampung

⁷⁷Erina Pane, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Anak Luar Nikah*, (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2014), h. 4.

⁷⁸Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Tuntunan Praktis Hukum Waris*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2009), h. 107.

Provinsi Lampung mengikuti peraturan yang terdapat di Kompilasi Hukum Islam. Ketika nasabnya terputus oleh ayah biologisnya maka anak tersebut nasabnya hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya saja tidak kepada ayah biologisnya dan dalam pembagian harta warisnya juga terputus. Namun ada sebuah solusi untuk menangani hal tersebut yaitu berupa hibah, karena walaupun dan bagaimanapun anak itu adalah anak kandung dari seorang ayah tersebut, dan juga dapat mengikuti peraturan Hukum Perdata serta putusan Mahkamah Kontitusi di Indonesia, tetapi hal tersebut hanya sebuah solusi dalam memberikan harta waris kepada anak luar nikah, karena tokoh Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung tetap berpegang teguh pada peraturan yang terdapat di Kompilasi Hukum Islam.⁷⁹

Menurut bapak KH. Khairuddin Tahmid selaku wakil rois Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung bahwasannya memang sudah jelas anak luar nikah tidak lah mendapatkan waris dari ayah biologisnya karena orang yang mendapatkan harta warisan adalah orang-orang yang memiliki kedudukan *dzawil furudh*, dan juga *dzawil arham*, dan menurut perspektif hukum Islam anak luar nikah itu adalah anak yang tidak diikat dengan perkawinan yang sah, maka dari itu anak tersebut tidak termasuk orang-orang yang mendapat bagian warisan dari ahli warisnya dan anak luar nikah memang tidak mendapatkan harta waris dari ayah biologisnya karena terhalang akan tetapi walaupun dan bagaimanapun anak tersebut adalah anak kandung yang sah dari ayah dan ibu biologisnya hanya saja anak tersebut lahir sebelum ikatan perkawinan yang sah jadi jalan keluar

⁷⁹Hasil wawancara dengan KH. RM. Soleh Bajuri (Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung), Pada tanggal 06 Desember 2017, Pukul 18:29 WIB, Di Gedung 1 Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung.

ataupun solusi ayah biologis dalam memberikan harta terhadap anak tersebut adalah berupa hibah, sedangkan harta warisan dari ibu biologisnya anak yang di luar nikah tersebut dapat di berikan sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan yaitu, sedangkan harta yang berupa hibah tidak ada ketentuan ataupun batasan pemberiannya terhadap siapa yang akan di berikannya, karena dalam Islam pemberian-pemberian selain waris boleh di lakukan oleh pewaris selama tidak lebih dari 1/3. Apabila anak yang lahir di luar nikah jika ingin menikah yang menjadi walinya adalah wali hakim karena terhadap ayah biologisnya itu terputus.⁸⁰

Menurut pandangan bapak Munawir selaku ketua Lembaga Batsul Masail Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung juga mengatakan kedudukan anak yang lahir di luar pernikahan pernikahannya nanti jika ingin menikah yang akan menjadi walinya adalah wali hakim, sedangkan jika ditinjau dari segi harta warisnya terputus terhadap ayah biologisnya, anak tersebut hanya dapat di berikan warisannya hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Dalam sebuah pernikahan itu pasti sama-sama memiliki harta, dan apabila harta tersebut mutlak dari hartanya ibu biologis maka anak tersebut mendapatkan hak nya dari warisan ibu biologisnya, berikut ini adalah contoh semisalnya seorang ibu meninggal maka pembagiannya biasanya jika untuk anak laki-laki adalah Ashabah dan jika anak perempuan itu setengah dari bagian anak laki-laki dari harta ibunya, karena di dalam pernikahan harta dari seorang ayah dan seorang ibu itu dapat di

⁸⁰Hasil wawancara dengan KH. Khairuddin Tahmid (Wakil Rois Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung), Pada tanggal 02 Februari 2018, Pukul 10:00 WIB, Di Kantor Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

bedakan. Ataupun bila seorang suaminya yang meninggal terlebih dahulu maka istri dan anaknya tetap dapat, jika anak tersebut anak laki-laki maka yang lain mahjub sedangkan jika tidak ada anak laki-lakinya maka naik ke saudara laki-lakinya, ketika anak luar nikah itu tidak mendapatkan harta waris maka ayah biologisnya itu bisa memberikan harta berupa hibah ataupun wasiat, pembagian wasiat itu tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$, walaupun memberikannya lebih dari $\frac{1}{3}$ sisanya maka harus di berikan kepada hak ahli waris sedangkan hibah itu bisa berapa saja tanpa ada batasan dan hibah ini di wasiatkan selagi ayah tersebut masih hidup.⁸¹

Menurut bapak H. Ihya Ulumudin selaku mantan katib suriah Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung pengertian anak di luar nikah juga dapat diartikan secara *lughawi* adalah anak yang tidak mempunyai bapak. Ulama-ulama fiqh mengatakan apabila ada seorang anak perempuan yang hamil kemudian di nikahi oleh siapapun baik oleh yang menghamilinya maupun oleh orang lain manakala umur pernikahannya dari dia mulai akad nikah sampai anak itu lahir lebih dari 6 bulan walaupun satu hari lebihnya maka itu bisa di nasabkan kepada yang menikahnya itu, akan tetapi apabila kurang dari 6 bulan maka anak itu tidak bisa di nasabkan atau di bintikan kepada orang tersebut walaupun secara biologis itu bapak kandungnya sendiri maka akibatnya laki-laki tersebut tidak bisa mewalikan anaknya sendiri walaupun itu adalah anak biologisnya. Dan pembagian harta waris untuk anak tersebut jelas terputus dari ayah biologisnya

⁸¹Hasil wawancara dengan Bapak Munawir(Ketua Lembaga Batsul Masail Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung), Pada tanggal 02 Februari 2018, Pukul 15:00 WIB, Di Keputaran Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

tetapi ada solusi jalan keluarnya bila mana seorang ayah tersebut ingin memberikan hartanya kepada anaknya yaitu berupa hibah. Jadi apabila harta tersebut berupa hibah maka harta tersebut harus diberikan saat ayah biologisnya masih hidup, dan anak tersebut juga tidak wajib menerima nafkah dari ayah biologisnya karena nasabnya jelas terputus, maka dari itu hal tersebut sangat berbahaya apabila perbuatan zina atau menghamili seorang wanita di luar pernikahan yang sah⁸² karena di dalam surat al-Isrā ayat 32 Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”⁸³

C. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah dan Pembagian Harta Warisnya

Menurut bapak Syamsul Hidayat selaku wakil ketua Muhammadiyah Provinsi Lampung mengatakan anak luar nikah adalah anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, jadi anak tersebut adalah anak yang lahir dari hasil zina kedua orangtuanya, dan nasabnya terputus karena anak tersebut adalah anak yang di hasilkan di luar pernikahan yang sah pembagian harta waris untuk anak tersebut juga terputus sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 anak tersebut tidak bisa di nasabkan kepada ayah biologisnya, akan tetapi anak tersebut

⁸²Hasil wawancara dengan Bapak H. Ihya Ulumudin (Mantan Katib Suriah Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung), Pada tanggal 14 Maret 2018, Pukul 15:00 WIB, Di Jalan WA Rahman Cibiah Batu Putuk Teluk Betung Barat.

⁸³Dapartemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2005), h. 227.

hanya bisa di nasabkan kepada ibu biologisnya dan keluarga ibunya saja. Jadi anak tersebut sudah jelas tidak mendapatkan warisan dari ayah biologisnya akan tetapi ada solusi untuk memberikan sebuah harta kepada anak tersebut karena walaupun dan bagaimanapun anak tersebut adalah anak kandung dari ayah biologisnya walaupun anak tersebut lahir di luar pernikahan yang sah, solusinya yaitu bisa berupa wasiat wajibah sesuai dengan fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, di dalam fatwa tersebut MUI memberikan ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab , wali nikah, waris, dan munafaqah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan munafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
 - a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut
 - b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.

6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan untuk melindungi anak, bukan untuk mensahkan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.⁸⁴

Menurut bapak Jayusman selaku sekretaris MTT Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung menyatakan menurut Imam Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i (dalam hal ini disebut Juhum Ulama) berpendapat bahwa anak luar nikah dapat mewarisi dari ibu dan kerabat ibunya, dan ibu serta kerabat ibunya pun dapat mewarisi darinya, sesuai dengan kaidah waris mewarisi dalam Islam dan salah satu akibat dari perkawinan yang sah, anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah anak sah, memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya, sebagaimana ketentuan pasal 42 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 99 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Hubungan keperdataan yang dimaksud meliputi hak nasab (garis keturunan) anak dihubungkan kepada ayah (dalam Islam), hak pemenuhan nafkah dari orang tua terhadap anak, hak pemeliharaan dan pendidikan (hadhanah), hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak-hak keperdataan lainnya. Berbeda halnya dengan perkawinan yang sah, perkawinan tidak sah tidak memiliki akibat hukum apapun terhadap pihak yang terikat dalam perkawinan tersebut. Anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan biologisnya saja. Dan ia tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga menentukan sama, sebagaimana dalam ketentuannya "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan

⁸⁴Hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Hilal (Wakil ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung), Pada tanggal 06 Desember 2017, Pukul 10:30 WIB, Di Gedung Fakultas FEBI UIN Raden Intan Lampung.

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” (Pasal 43 ayat (1)). Jika kita hubungkan dengan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 dengan menggunakan interpretasi hukum *a contrario* perkawinan yang tidak sah adalah perkawinan yang dilakukan tidak menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga tidak ada hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan tersebut, karena memang secara hukum perkawinan tersebut tidak ada. Maka tidak ada legal standing bagi masing-masing pihak untuk mengajukan gugatan kelalaian kewajiban terhadap suatu pihak tertentu. Satu hal yang menjadi persoalan, bagi seorang laki-laki dan perempuan yang telah melakukan hubungan di luar nikah, mereka tidak mendapat perlindungan hukum karena telah melakukan pelanggaran terhadap hukum tersebut, sehingga sebagai sanksi hukum hak yang semestinya mereka dapatkan tidak diayomi oleh hukum, hal ini adalah sebuah resiko yang sangat logis yang harus diterima. Persoalannya adalah anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut apakah ikut menanggung dosa yang telah dilakukan kedua orang tua biologisnya. Karena anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan dengan ibunya, maka anak tersebut tidak memiliki hak apapun dari ayah biologisnya, karena secara hukum baik hukum agama maupun hukum nasional dia tidak memiliki pertalian darah (nasab) dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Sehingga oleh sebab itu anak di luar nikah tidak memperoleh hak-hak materil dan moril yang semestinya harus diperoleh oleh seorang anak dari ayahnya. Dalam pemberian harta waris menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tanggal 13 Februari 2012, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan

ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Anak luar nikah tetap mendapatkan jaminan financial dari harta orang tuanya yang meninggal melalui jalur wasiat wajibah. Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 menyatakan: (1) Orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur terkait hubungan anak angkat dan orang tua angkatnya. Namun dalam perkembangannya, Yurisprudensi juga menetapkan wasiat wajibah antara anak dengan orang tua biologisnya, dan antara orang tua dan anaknya yang berbeda agama.⁸⁵

Menurut bapak Bunyana Sholihin selaku Badan Syariah LazMU juga berpendapat bahwasannya anak yang lahir di luar nikah itu tidak mendapatkan harta waris akan tetapi jika ada bukti tertulis seperti hibah dan wasiat wajibah untuk anak tersebut dari ayah biologisnya maka anak tersebut mendapatkan hak harta warisnya sebagaimana yang telah ditentukan. Anak luar nikah itu hanya bisa mendapatkan harta warisan dari harta ibu biologisnya. Dan harta ibu juga bukan hanya harta ibunya saja, ada juga harta dari suaminya dan ketika suaminya meninggal dan ibunya masih hidup maka ibunya akan mendapatkan waris dan pembagiannya yaitu jika dia mempunyai anak dia mendapatkan $\frac{1}{8}$ dan apabila

⁸⁵Hasil wawancara dengan Bapak Dr. Jayusman, M.Ag (Sekertaris MTT Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung), Pada tanggal 01 Maret 2017, Pukul 10:30 WIB, Di Gedung Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

dia tidak mempunyai anak dia mendapatkan $\frac{1}{4}$. Dari waris ibu itulah ketika dia meninggal maka dibagi kepada anak-anaknya karena bagaimanapun anak tersebut adalah anak kandung dari ibu tersebut. Sedangkan masalah pendidikan anak luar nikah terhadap ayah biologisnya maka ayah biologis tersebut jika sampai ketahuan oleh pihak pengadilan maka ayah tersebut wajib menebus hukumannya yaitu harus bertanggung jawab atas pendidikan anaknya sampai dia dewasa, hal ini merupakan suatu hukuman kepada ayah biologisnya terhadap anak yang lahir di luar nikah, karena hal itu telah melanggar nash, selagi nash ada maka hal itu menjadi acuan kecuali tidak ada nash maka berijtihad, sebab Allah SWT lebih tahu apa yang umatnya kerjakan.⁸⁶

Menurut bapak Mansyur Hidayat selaku Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung mengatakan bahwasannya memang sudah jelas kedudukan hukum anak tersebut hanya memiliki hubungan kepada ibunya dan keluarga ibunya tidak dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilan wanita tersebut, tetapi solusi harta yang diberikan kepada anak tersebut yaitu berupa hibah. Apabila ada seorang lelaki dan perempuan yang menikah namun si wanita tersebut sedang tengah mengandung seorang bayi maka pernikahan mereka itu sah dan anak itu terhitung sebagai anaknya lelaki tersebut jika laki-laki yang

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Bunyana Sholihin, M.Ag (Badan Syariah LazMU Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung), Pada tanggal 11 Maret 2017, Pukul 15:30 WIB, Di Gedung Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

menikahnya itu memang yang membuahi, jadi untuk membuktikan bahwa anak itu adalah anaknya lelaki tersebut yaitu melalui test DNA.⁸⁷



⁸⁷Hasil wawancara dengan Bapak DRS. Mansyur Hidayat, M.Sos.I (Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung), Pada tanggal 15 Maret 2017, Pukul 16:00 WIB, Di Gedung Fakultas Dakwah UIN Raden Intan Lampung.

BAB IV

ANALISIS

A. Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Provinsi Lampung

Hukum Islam telah mengatur untuk menjaga nasab dengan mensyariatkan pernikahan sebagai cara yang dipandang baik dan sah dalam menjaga kemurnian nasab sehingga Islam sangat menekankan sekali adanya pernikahan yang bertujuan tidak lain untuk menentukan keturunan yang baik, menjaga nasab menghindari dari perbuatan yang dilarang agama, menciptakan keluarga yang di idamkan serta agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah mempunyai status yang jelas. Artinya seorang anak yang di proleh dengan jalan zina akan berdampak status yang tidak jelas serta akan banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan nantinya dan nasabnya pun hanya kepada ibunya bukan kepada bapaknya, menurut pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah pun berpendapat bahwasannya anak yang di luar nikah itu atau anak zina itu nasabnya terputus dari ayah biologisnya dan hanya bernasab kepada ibunya saja. Namun anak tersebut tidak berdosa atas kelahiran anak tersebut di bumi ini, akan tetapi kedua orang tuanya lah yang berdosa karena telah melakukan hal yang di larang oleh agama. Ayah biologisnya juga tidak bisa menjadi wali nikah ketika anak itu menikah akan tetapi anak tersebut hanya bisa walikan oleh wali hakim, dan tidak bisa juga di bintikan oleh ayah biologisnya, dia hanya di bintikan oleh ibunya saja.

Pengertian zina itu sendiri adalah hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan di luar pernikahan yang sah menurut agama maupun Negara. Sedangkan anak zina adalah anak yang dikandung dan dilahirkan oleh ibunya dari seorang laki-laki yang menggaulinya tanpa adanya pernikahan antara keduanya. Dalam hal ini anak tersebut lahir dengan keadaan suci tidak menanggung dosa dari perbuatan kedua orangtuanya yang telah melakukan zina tersebut.

Kedudukan anak menurut hukum Islam sebagaimana telah dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya sama dengan UU perkawinan karena pasal 100 Kompilasi Hukum Islam mengandung makna yang sama dengan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dimana pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “anak yang lahir di luar pernikahan perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dalam hukum Islam anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan pihak ibunya, baik dalam hal pemeliharaan, perwalian, maupun dalam hal pewarisan. Hubungan tersebut di peroleh dengan sendirinya, artinya tidak di perlukan suatu perbuatan hukum tertentu. Seperti ditentukan dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dapat diketahui bahwa memelihara dan menjaga kemurnian nasab sangatlah penting mengingat betapa pentingnya permasalahan nasab ini maka ajaran Islam melalui pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Provinsi Lampung sangat menekankan aturan dan kemurnian nasab ayah biologis terhadap harta waris anak yang lahir di luar nikah, sebab

disamping sebagai nikmat dan karunia yang besar sebagai hamba Allah, nasab juga merupakan hak paling pertama yang harus diterima oleh seorang anak sebelum hak-hak lain diperoleh dari kedua orangtuanya.⁸⁸ Kemudian menurut kedua pandangan tokoh yaitu tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Lampung itu memiliki persamaan pendapat dalam menyikapi anak yang lahir di luar nikah karena mereka sama-sama berpegang teguh pada dasar hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Al-Hadits dan pendapat para Ulama (Ijtihad).

Jadi dari uraian di atas apabila setiap anak yang dilahirkan atau dibuahkan dalam ikatan yang sah menurut agama dan negara maka anak tersebut dapat disebut anak sah memiliki hubungan perdata yang kuat antara kedua orangtuanya serta mempunyai hak dan kewajiban yang dijamin oleh agama dan negara, akan tetapi apabila sebaliknya jika anak yang lahir tersebut berada di luar suatu ikatan perkawinan yang sah (akibat zina) maka anak tersebut dapat dikatakan anak luar nikah, dan menurut pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Lampung yaitu tidak adanya hubungan perdata terutama kepada ayahnya serta tidak memiliki hak dan kewajiban sepenuhnya kepada orangtuanya terutama ayah biologisnya baik menurut agama maupun menurut negara, karena nasabnya telah terputus kepada anaknya.

B. Pembagian Harta Waris Anak Luar Nikah Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Provinsi Lampung

Mengenai pembagian harta waris terhadap anak yang lahir di luar pernikahan yang sah sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 dan

⁸⁸ Nurul Irfan, *Loc. Cit*, h.21

anak tersebut hanya mendapatkan harta warisan dari ibu kandungnya saja, dan dari ayah biologisnya terputus hal ini juga sebagaimana yang telah dijelaskan oleh tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Lampung bahwasannya anak tersebut tidak mendapatkan harta waris dari ayah biologisnya karena nasabnya terputus akan tetapi pertalian nasab dengan ibunya masih utuh. Oleh karena itu mereka dapat mempusakai orangtuanya dari pihak ibu dan keluarga ibunya, bukan dari pihak bapaknya⁸⁹.

Namun menurut tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Provinsi Lampung ada solusi untuk mengatasi hal tersebut karena walaupun dan bagaimanapun anak tersebut juga adalah anak kandung dan darah daging ayah tersebut maka jalan keluar atau solusi untuk menangani masalah tersebut dapat berupa hibah dan berupa wasiat wajibah, dan apabila harta tersebut berupa hibah maka diberikannya kepada anak tersebut sebelum ayahnya meninggal dunia karena jika ayah tersebut telah meninggal dunia maka tidak bisa anak tersebut mendapatkan bagian harta peninggalan ayahnya, dan sedangkan apabila diberikannya berupa wasiat wajibah maka harta tersebut tidak boleh lebih dari 1/3 untuk anak tersebut.

Jika kita lihat dari teori-teori hukum Islam yang telah ditulis di atas maka dalam hal ini saya berpendapat bahwa apa yang sudah menjadi pendapat kedua tokoh organisasi masyarakat Islam di Indonesia adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah yakni nasabnya terputus kepada ayah biologisnya karena sudah jelas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam namun hal tersebut bukanlah

⁸⁹Fatchur Rahman, *Loc. Cit*, h.222.

merupakan suatu yang dosa bagi anak tersebut karena anak itu telah lahir di bumi ini, yang menjadi tanggungan dosanya yaitu kedua orangtuanya, karena telah melanggar aturan Islam, dan anak tersebut tidak bisa di walikan oleh ayah biologisnya akan tetapi anak tersebut di walikan oleh wali hakim, serta pembagian harta warisnya menurut kedua tokoh tersebut sama-sama menyatakan bahwasannya anak tersebut tidak mendapatkan harta waris dari ayah biologisnya tetapi ada sebuah jalan keluar ataupun solusi untuk menangani hal ini yaitu berupa hibah dan wasiat wajibah karena kedua tokoh ulama tersebut menganut hukum Islam yang sama yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits jadi keduanya mengemukakan pendapat yang hampir sama. Namun penulis juga berpendapat bahwa solusi atau jalan keluar untuk memberikan harta waris anak di luar nikah yaitu berupa wasiat wajibah, karena sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan pembahasan mulai dari bab pendahuluan sampai analisis data, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. kedudukan anak luar nikah menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Provinsi Lampung adalah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 yaitu anak tersebut nasabnya dengan ayah kandung biologisnya terputus dan hanya bernasabkan kepada ibu kandungnya dan keluarga ibu kandungnya saja. Namun anak tersebut tidak menjadi beban dosa kedua orangtuanya, karena semua anak itu di mata Allah SWT itu suci hanya saja kedua orangtuanya itulah yang bersalah dan berdosa atas apa yang dia lakukan di bumi.
2. Pembagian harta waris anak luar nikah menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Provinsi Lampung yaitu apabila anak itu tidak memiliki bukti hukum yang kuat dari ayah biologisnya untuk mendapatkan hak warisnya maka anak tersebut tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta waris dari ayah biologisnya karena pada dasar yang telah ditentukan harta anak luar nikah hanya bisa dia dapatkan melalui ibu kandungnya dan keluarga ibu kandungnya saja karena dari ayah kandungnya itu nasabnya telah terputus. Sebagian besar ulama telah berpendapat untuk memberikan jalan keluar untuk hal yang seperti ini karena walaupun dan bagaimanapun anak itu adalah anak kandung yang sah di mata Allah SWT, menurut pandangan tokoh

Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Provinsi Lampung berpendapat bahwa anak tersebut dapat menerima harta berupa wasiat wajibah atau hibah dari ayah biologisnya selagi ayahnya mau memberikannya kepada anaknya dan selagi ayahnya masih hidup, maka bisa diberikan harta tersebut berupa hibah. Jika ayah tersebut telah meninggal dunia dan bukti tertulis juga tidak ada maka anak tersebut tidak mendapatkan apa-apa dari ayah biologisnya. Apabila anak tersebut diberikan melalui wasiat wajibah oleh ayahnya maka anak tersebut hanya berhak menerima 1/3. Hal ini juga sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya. Namun penulis juga berpendapat bahwa solusi atau jalan keluar untuk memberikan harta waris anak di luar nikah yaitu berupa wasiat wajibah, karena sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.

B. SARAN

Setelah melakukan analisis tentang kedudukan anak luar nikah terhadap harta waris menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah Provinsi Lampung maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam segenap permasalahan manusia, maka penyelesaian yang arif dan bijaksana, yang diambil dari dasar utama hukum Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunah, dan hukum-hukum yang lahir dari keduanya.

2. Hendaknya kita selalu kritis dalam menerima pendapat atau serbagai pendapat dibidang hukum, lebih-lebih kalau hukum itu erat kaitannya dengan kemaslahatan umat.
3. Tetaplah menjadi umat yang berakhlak mulia serta selalu berpegang teguh pada ajaran Nabi dan patuh terhadap Allah SWT serta menjauhi laranganNya, karena perbuatan zina itu merupakan suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

Daftar Pustaka

- Abdul Hakim, Halid. 2004. *Ahkamul-Mawarits fil-fiqhil-islami*. terjemahan Addy Aldizar dan Fathurrahman. *Hukum Waris*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Abdurahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ahmad Saebani, Beni. 2010. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ali, Zainudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Al-Sabouni, Muhammad. 2005. *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Dar Al Kutub Al-Islamiyah.
- Arikunto, Suharsimi. 1991. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashofa, Burhan. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dapartemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Al-Qur'an dan Terjamahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponogoro.
- Djubaidah, Neng. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Firdaweri. 2016. *Fiqh mawaris*. Bandar Lampung: Fadil Hamdani.
- Habiburrahman. 2012. *Anak Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. artikel pada Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, edisi no. 75.
- Handikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- [Http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-50-det-sejarah.html](http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-50-det-sejarah.html), diakses pada tanggal: 16 Desember 2017, Pukul 15:35 WIB.
- [Http://www.nu.or.id/about/paham+keagamaan](http://www.nu.or.id/about/paham+keagamaan), diakses pada tanggal: 16 Desember 2017, Pukul 15:27 WIB.
- [Https://seanochan.wordpress.com/2014/06/05/hak-waris-anak-zina/](https://seanochan.wordpress.com/2014/06/05/hak-waris-anak-zina/), diakses pada tanggal: 2 Januari 2018, Pukul 05:00 WIB.
- [Http://farhanhajarudin.blogspot.co.id/2015/01/book-report-hukum-waris-part4.html](http://farhanhajarudin.blogspot.co.id/2015/01/book-report-hukum-waris-part4.html), diakses pada tanggal: 05 Januari 2018, Pukul 22:30 WIB.

[Http://nulampung.or.id/blog/nu-dan-sejarah-berdirinya.html](http://nulampung.or.id/blog/nu-dan-sejarah-berdirinya.html), diakses pada tanggal 26 Februari 2018, Pukul 05:00 WIB.

[Http://nahdlatululama.id/organisasi/visi-misi/#](http://nahdlatululama.id/organisasi/visi-misi/#), diakses pada tanggal 26 Februari 2018, Pukul 04:30 WIB.

Husein Nasution, Amin. 2012. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Raja Grafindo.

Husni, Lalu. 2000, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Irfan, M. Nurul. 2012. *Nasab Dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: AMZAH.

Jalaludin, Akhmad. 2012. *Nasab: Antara hubungan Darah dan Hukum serta Implikasinya terhadap Kewarisan*. Surakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Jawad Mughniyah, Muhammad. 1996. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera Basritama.

Kamal, Abu Malik bin As-Sayyid Salim. 2009. *Shohiihu fiqhissunnati Waadillatahu wa Taudhihu madzhaahibil Aimmati*. terjemahan Ade Ichwan Ali. *Tuntunan Praktis Hukum Waris*. Jakarta: Pustaka Ibnu Umar.

Kartono, Kartini. 1986. *Pengantar Metode Research Sosial*. Bandung: Mandar Maju.

Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.

Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Muthiah, Aulia. 2017. *Hukum Islam Dinamika Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Nasution. 2012. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nasution, Husein. 2012. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Raja Grafindo.

Nurrudin, Amiur dan Akmal Tarigan, Azhari. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Perangin, Effendi. 2013. *Hukum Waris*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- R. Tjitrosudiblo, Subekti. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Rahman, Fatchur. 1981. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Alma'rif.
- Rofiq, Ahmad. 1995. *Fiqih Mawaris*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Sakirman, Desember 2016. "Konvergensi Pembagian Harta Waris dalam Hukum Islam". *al- 'Adalah*. Vol. XXI, No. 2.
- Salihima, Syamsulbahri. 2015. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Syarifudin, Amir. 2008. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- _____. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana
- Witanto, DY. 2012. *Hukum keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.